

Indikator Penting

Provinsi Papua

Edisi Agustus 2023



Indikator Penting

Provinsi Papua

Edisi Agustus 2023





©Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

INDIKATOR PENTING PROVINSI PAPUA
EDISI AGUSTUS 2023

ISSN : 2477-4772
Katalog BPS : 1103009.94
No. Publikasi : 94000.2216

Naskah: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Editor : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Tata Letak : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Kover : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Dicetak Oleh : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Jayapura : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2023
xiv + 67 halaman; 18,2 cm x 25,7 cm (B5 JIS)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

INDIKATOR PENTING PROVINSI PAPUA

Edisi Agustus 2023

Pengarah :

Adriana Helena Carolina, SE., MM

Editor :

Priyo Yudyatmoko, S.ST, M.P.P.

Penulis :

Deny Riani Maghfiroh, S.ST

Pengolah Data :

Deny Riani Maghfiroh, S.ST

Penyiapan Draft :

Deny Riani Maghfiroh, S.ST



headline

5

Ekspor Impor Juli 2023

Ekspor (Juta US\$)	257,43
Impor (Juta US\$)	46,85
Neraca Perdagangan(Juta US\$)	210,58



6

Pariwisata Juni 2023

Tingkat Penghunian Kamar (TPK)	33,06%
Rata-rata lama tamu menginap (RLMT)	1,56 hari



7

Indeks Ketimpangan Gender 2022

IKG Papua 2022	0,515
Perubahan	-0,020

8

Pertumbuhan Ekonomi Tw II-2023

Laju Pertumbuhan Tw II-2023 (y-o-y)	3,81%
Laju Pertumbuhan Tw II-2023 (q-to-q)	9,83%
Laju Pertumbuhan Semester I-2023 (c-to-c)	0,0%





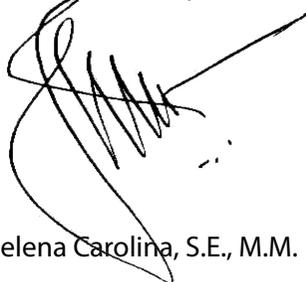
Kata Pengantar

Indikator Penting Provinsi Papua ini diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua. Data dan informasi yang dimuat merupakan perkembangan data terbaru yang dihimpun dan dirilis BPS, yang merupakan hasil pendataan langsung dan hasil kompilasi produk administrasi pemerintah yang dilakukan secara teratur (bulanan, triwulanan dan tahunan) oleh jajaran BPS di seluruh Provinsi Papua.

Publikasi ini dimaksudkan untuk melengkapi bahan penyusunan kebijakan dan evaluasi kemajuan yang dicapai baik di bidang sosial maupun bidang ekonomi. Indikator Penting Provinsi Papua ini mencakup antara lain: Penduduk, perkembangan bulanan Inflasi, Transportasi, Nilai Tukar Petani (NTP), Ekspor-Impor, Pertumbuhan Ekonomi, Ketenagakerjaan, Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan, IKK, IPM, serta Produksi Tanaman Pangan.

Data yang lebih luas dan spesifik untuk sektor tertentu, tersedia dalam publikasi BPS lainnya atau dapat diperoleh melalui website <http://papua.bps.go.id>. Semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh penggunanya.

Jayapura, Agustus 2023
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA,



Adriana Helena Carolina, S.E., M.M.





Daftar Isi

vii	●	KATA PENGANTAR	
ix	●	DAFTAR ISI	
x	●	DAFTAR TABEL	
xi	●	DAFTAR GAMBAR	
xiii	●	RINGKASAN EKSEKUTIF	
PERTANIAN			
	●	Tanaman Pangan	3
SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN			
7	●	Penduduk	
10	●	Kemiskinan	
14	●	Ketimpangan	
15	●	Indeks Demokrasi Indonesia	
16	●	Ketenagakerjaan	
19	●	Indeks Pembangunan Manusia	
22	●	Indeks Kebahagiaan	
24	●	Potensi Desa (PODES)	
26	●	Indeks Ketimpangan Gender	
EKONOMI DAN PERDAGANGAN			
	●	Inflasi (<i>update</i>)	31
	●	Produk Domestik Regional Bruto (<i>update</i>)	34
	●	Ekspor (<i>update</i>)	37
	●	Impor (<i>update</i>)	40
	●	Nilai Tukar Petani (<i>update</i>)	43
	●	Angkutan Laut (<i>update</i>)	47
	●	Angkutan Udara (<i>update</i>)	49
	●	Industri Manufaktur	52
	●	Pola Distribusi Perdagangan	54
	●	Pariwisata (<i>update</i>)	55
61	●	LAMPIRAN	



Daftar Tabel

Tabel 1.	Garis Kemiskinan Menurut Daerah Provinsi Papua Maret 2015-Maret 2023 (rupiah)	12
Tabel 2.	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja serta Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja di Provinsi Papua	17
Tabel 3.	Indeks Kebahagiaan dan Indeks Dimensi Menurut Karakteristik, 2021	23
Tabel 4.	Tingkat inflasi Month to Month, Year To Date, Year On Year tahun 2021 - 2023	31
Tabel 5.	IHK, Andil Inflasi, dan Inflasi Year on Year Gabungan 3 Kota IHK di Papua Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)	32
Tabel 6.	Laju Pertumbuhan PDRB dengan Pertambangan dan Penggalan ADHB Menurut Beberapa Kategori Lapangan Usaha (persen)	35
Tabel 7.	Laju Pertumbuhan PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (persen)	36
Tabel 8.	Ringkasan Perkembangan Ekspor Provinsi Papua Juli 2023	37
Tabel 9.	Ringkasan Perkembangan Impor Provinsi Papua Juli 2023	40
Tabel 10.	Neraca Perdagangan Provinsi Papua (Juta US\$)	41
Tabel 11.	Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian Menurut Subsektor Provinsi Papua dan Persentase Perubahannya, Juni-Juli 2023 (2018=100)	45
Tabel 12.	Perkembangan Penumpang Berangkat dan Datang Angkutan Laut Dalam Negeri Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke, Juni 2023	47
Tabel 13.	Perkembangan Bongkar dan Muat Barang Angkutan Laut Dalam Negeri Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke, Juni 2023	48
Tabel 14.	Perkembangan Penumpang Berangkat dan Datang Angkutan Udara Dalam Negeri Bandara Sentani, Mopah, dan Mozes Kilangin, Juni 2023	49
Tabel 15.	Perkembangan Bongkar dan Muat Barang Angkutan Udara Dalam Negeri Bandara Sentani, Mopah, dan Mozes Kilangin, Juni 2023	50
Tabel 16.	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Menurut KBLI Provinsi Papua Triwulan IV-2019 (persen)	53
Tabel 17.	Pola Utama Distribusi Perdagangan di Papua Tahun 2022	54
Tabel 18.	TPK dan RLTM Hotel Bintang di Papua, Juni 2023	55
Tabel 19.	TPK dan RLTM Hotel Non Bintang di Papua, Juni 2023	56

Daftar Gambar

Gambar 1.	Produksi Beras Provinsi Papua Tahun 2021-2023* (Ton)	3
Gambar 2.	Penduduk Miskin Provinsi Papua Maret 2015–September 2023	11
Gambar 3.	Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan Provinsi Papua Maret 2015–Maret 2023 (rupiah)	12
Gambar 4.	Indeks Demokrasi Provinsi Papua, 2010-2020	15
Gambar 5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Klasifikasi Wilayah Agustus 2020-Agustus 2022 (%)	17
Gambar 6.	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Nasional dan Papua Tahun 2010–2022	20
Gambar 7.	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua, 2022	20
Gambar 8.	Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan UPT/SPT Hasil PODES Provinsi Papua Tahun 2011, 2014 dan 2018	22
Gambar 9.	Perkembangan Sarana Sektor Ekonomi Provinsi Papua, 2014 dan 2018	24
Gambar 10.	Perkembangan Sarana Sektor Pendidikan Provinsi Papua, 2014 dan 2018	25
Gambar 11.	Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Papua, 2018-2022	26
Gambar 12.	Pertumbuhan Ekonomi y-on-y Provinsi Papua, Triwulan I-2020–Triwulan II-2023 (persen)	35
Gambar 13.	Nilai Ekspor Provinsi Papua Menurut Negara Tujuan, Juli 2023* (Juta US\$)	38
Gambar 14.	Nilai Impor Provinsi Papua Menurut Negara Tujuan, Juli 2023* (Juta US\$)	41
Gambar 15.	Perkembangan NTP Papua Menurut Subsektor Juni-Juli 2023(2018=100)	43
Gambar 16.	Perkembangan Indeks Konsumsi Rumah Tangga Menurut Subkelompok Pengeluaran Provinsi Papua Juni-Juli 2023(2018=100)	44
Gambar 17.	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Menurut KBLI Provinsi Papua Triwulan IV-2019 (persen)	52

RINGKASAN EKSEKUTIF

Edisi Agustus 2023

1. Inflasi

- Pada bulan Juli 2023, tercatat gabungan 3 kota HK di Papua mengalami inflasi 3,40 persen.
- Inflasi terjadi di Merauke sebesar 5,21 persen, di Timika sebesar 4,93persen, dan di Jayapura sebesar 2,17 persen.
- Inflasi tahun kalender (Januari-Juli 2023) gabungan 3 kota IHK sebesar 2,35 persen.
- Inflasi tahun ke tahun (Juni 2023 terhadap Juli 2022) sebesar 3,40 persen.

2. Nilai Tukar Petani

- Nilai Tukar Petani (NTP) Papua pada Juli 2023 sebesar 100,11 atau mengalami peningkatan 0,06 persen dibandingkan Juni 2023.
- Komponen Pembentuk NTP yaitu Indeks Harga Diterima Petani (It) sebesar 111,08 dan Indeks Harga Dibayar Petani (Ib) sebesar 110,96.
- Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian Papua sebesar 101,58 atau mengalami penurunan sebesar 0,02 persen dibandingkan Juni 2023.

3. Transportasi

a. Transportasi Laut

- Jumlah penumpang yang berangkat pada Juni 2023 dengan moda angkutan laut sebanyak 16.907 orang.
- Jumlah penumpang yang datang pada Juni 2023 dengan moda transportasi angkutan laut sebanyak 17.595 orang.
- Volume barang yang dimuat pada Juni 2023 sebanyak 12.745 ton.
- Volume barang yang dibongkar pada Juni 2023 sebanyak 107.473 ton.

b. Transportasi Udara

- Jumlah penumpang yang berangkat pada Juni 2023 dengan moda angkutan udara dalam negeri di tiga bandara sebanyak 99.863 orang.
- Jumlah penumpang yang datang pada Juni 2023 dengan moda transportasi angkutan udara dalam negeri di tiga bandara sebanyak 105.894 orang.
- Volume barang yang dimuat pada Juni 2023 sebanyak 9.405 ton.
- Volume barang yang dibongkar pada Juni 2023 sebanyak 986 ton.

4. Ekspor dan Impor

- Ekspor Papua pada Juli 2023 tercatat senilai US\$257,43 juta. Ekspor bulan ini berupa ekspor migas senilai US\$6.429 dan non migas sebesar US\$257,42 juta.
- Dilihat menurut ekspor golongan HS 2 digit, maka ekspor golongan Kayu dan Barang dari Kayu (HS44) senilai US\$4,01 juta, dan barang ekspor senilai US\$0,03 juta dari golongan Perkakas (HS82), golongan ikan, krustasea, & moluska (HS03), golongan Barang-barang rajutan (HS61), dan golongan



Kayu dan Barang dari Kayu (HS44).

- Total ekspor yang ditujukan ke enam negara tujuan utama (Spanyol, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, India dan Filipina) nilai ekspornya mencapai US\$251,53 juta dan ekspor yang dilakukan ke negara lain sebesar US\$5,90 juta.
- Impor Papua pada Juli 2023 sebesar US\$46,85 juta berupa impor migas senilai US\$18,50 juta dan impor non-migas sebesar US\$28,35 juta.
- Impor 10 golongan nonmigas utama pada Juli 2023 tercatat senilai US\$23,68 juta.
- Nilai impor dari 7 negara utama pada Juli 2023 sebesar US\$37,81 juta.
- Neraca Perdagangan Papua pada Juli 2023 mengalami surplus sebesar US\$210,58 juta. Kondisi surplus mengindikasikan bahwa nilai ekspor lebih besar dibandingkan nilai impornya.

5. Pariwisata

- TPK Hotel Bintang selama Juni 2023 mencapai 33,06 persen dengan jumlah tamu menginap sebanyak 26.787 tamu.
- Rata-rata lama menginap tamu (RLMT) di hotel bintang pada Juni 2023 mencapai 1,56 hari
- TPK Hotel nonbintang selama Juni 2023 mencapai 21,59 persen.
- Rata-rata lama menginap tamu (RLMT) hotel non bintang sebesar 1,48 hari.

6. Indeks Ketimpangan Gender

- Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Papua tahun 2022 sebesar 0,515, turun 0,020 poin dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,535.
- Menurunnya Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terutama dipengaruhi oleh perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi pemberdayaan
- Perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh perbaikan indikator wanita melahirkan tidak di fasilitas kesehatan yang turun dari 34,8 persen tahun 2021 menjadi 28,2 persen pada tahun 2022.
- Perbaikan dimensi pemberdayaan dipengaruhi oleh perbaikan indikator keterwakilan perempuan di legislatif dan indikator persentase laki-laki dan perempuan 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas.

7. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2023

- Besaran Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2023 mencapai Rp 71,08 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 44,97 triliun.
- Ekonomi Papua triwulan II-2023 terhadap triwulan II-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 3,81 persen (*y-on-y*). Jika dibandingkan triwulan II-2023 terhadap triwulan sebelumnya maka ekonomi Papua mengalami pertumbuhan sebesar 9,83 persen (*q-to-q*).
- Ekonomi Papua semester I-2023 terhadap semester I-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 0,76 persen (*c-to-c*).

PERTANIAN



MENGENAL SENSUS PERTANIAN 2023

Tahun 2023, Sensus Pertanian Indonesia akan menjadi Sensus Pertanian Ke-7

7

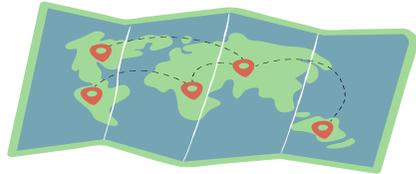


CAKUPAN ST 2023

- Tanaman Pangan
- Hortikultura
- Perkebunan
- Perikanan
- Peternakan
- Kehutanan
- Jasa Pertanian

CAKUPAN WILAYAH

34 Provinsi
514 Kabupaten/kota



CAKUPAN UNIT USAHA PERTANIAN

- Usaha Pertanian Perorangan
- Usaha Pertanian Berbadan Hukum
- Usaha Pertanian Lainnya

Sensus Pertanian dilakukan pada tahun berakhiran 3 sejak tahun 1963, 1973, 1983, 1993, 2003, 2013 dan 2023. Kegiatan ini dilakukan diseluruh Indonesia dengan wilayah sensus terkecil adalah Satuan Lingkungan Setempat (SLS). Selain itu tahun 2023, data yang digunakan berasal informasi awal dari hasil Sensus Penduduk 2020, data Kementan, KKP, KLHK, dan Sumber lainnya

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

1 Tanaman Pangan

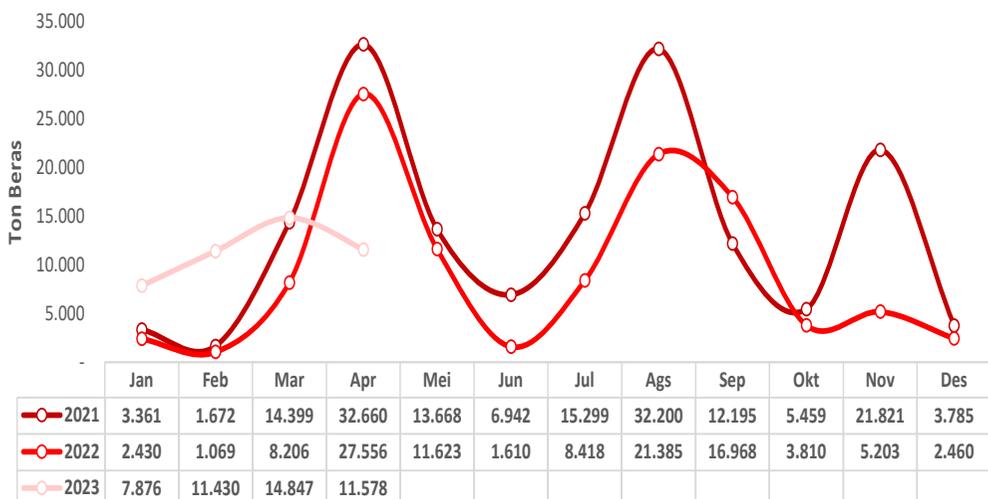
"Luas panen padi dan produksi padi pada tahun 2022 diperkirakan masing-masing sebesar 49.742 hektar dan 193.943 ton GKG"

Realisasi luas panen padi pada Januari-Desember 2022 sebesar 49.742 hektar atau mengalami penurunan 15.243 hektar (23,46 persen) dibandingkan 2021. Potensi luas panen padi pada Oktober-Desember 2022 mencapai 4.224 hektar. Luas panen padi pada Januari 2023 mencapai 3.322 hektar, dan potensi panen sepanjang Februari-April 2023 diperkirakan seluas 15.970 hektar. Total luas panen pada Subround Januari-April 2023 diperkirakan mencapai 19.292 hektar.

Produksi padi sepanjang Januari-Desember 2022 mencapai 193.943 ton GKG, atau turun 92.336 ton GKG (32,25 persen) dibandingkan 2021. Produksi padi tertinggi pada 2022 terjadi pada bulan April sebesar 48.261 ton GKG dan terendah pada bulan Februari sebesar 1.873 ton GKG.

Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksi padi dari Januari-Desember 2022 setara dengan 110.739 ton beras. Potensi produksi beras Februari-April 2023 sebesar 37.855 ton. Dengan demikian, potensi produksi beras pada Subround Januari-April 2023 diperkirakan mencapai 45.732 ton beras.

Gambar 1. Produksi Beras Provinsi Papua Tahun 2021-2023* (Ton)



Keterangan: * Produksi beras Januari-April 2023 adalah angka sementara

PENJELASAN TEKNIS

- Penghitungan angka produksi padi tahun 2022 dilakukan dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA). Dengan metode tersebut dapat dihitung luas panen dan potensi luas panen di Provinsi Papua.
- Metode KSA memanfaatkan citra satelit yang berasal dari LAPAN dan digunakan BIG untuk mendelineasi luas bahan baku sawah yang divalidasi dan ditetapkan kementerian ATR untuk mengestimasi luas padi.
- Produksi padi diperoleh dari hasil perkalian antara antara luas panen (bersih) dikalikan dengan produktivitas. Produksi beras diperoleh dari hasil konversi produksi padi menjadi beras dengan menggunakan angka konversi gabah menjadi beras. Produksi padi dan beras dihitung pada level kabupaten dan kota.
- Luas panen padi dihitung berdasarkan pengamatan yang objektif menggunakan metode KSA yang dikembangkan BPPT, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang sekarang bergabung dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan BPS.



SUMBER DATA

Data yang digunakan berasal dari
Survei Ubinan dan KSA





2 Penduduk

“TFR Papua berdasarkan hasil longform SP2020 mencapai 2,76”

1. Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)

Berdasarkan data longform SP2020, Angka Kelahiran Total (TFR) Papua mencapai 2,76. Angka ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 2-3 anak yang dilahirkan selama masa reproduksinya. Angka TFR mengalami penurunan dibandingkan pendataan hasil Sensus Penduduk pada tahun 1971 sebesar 7,21. Meskipun mengalami penurunan, TFR Papua menempati urutan kedua setelah Provinsi NTT sebesar 2,79.

2. Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur Tertentu (ASFR)

Jika dikelompokkan berdasarkan kelompok umur tertentu, ASFR di Papua membentuk huruf U terbalik. Artinya pada kelompok usia muda, anak yang dilahirkan rendah. Puncak ASFR Papua berada pada kelompok umur 20-24 tahun dimana tercatat 135 kelahiran dari 1.000 penduduk.

3. Angka Kelahiran Kasar/Crude Birth Rate (CBR)

Hasil longform SP2020 tercatat 22,03 kelahiran hidup dari 1.000 penduduk Papua.

4. Mortalitas

Angka Kematian Ibu di Papua sebesar 565 artinya terdapat 565 kematian perempuan saat hamil, melahirkan, atau masa nifas pada 1.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi di Papua mencapai 38 dari 1.000 kelahiran. Angka ini mengalami penurunan dari 57 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 38 per 1.000 kelahiran.

Angka Kematian Anak (usia 1-4 tahun) tercatat sebesar 10,88 artinya terdapat 10-11 kematian anak pada balita usia 1-4 tahun selama 1 tahun pada 1.000 balita. Angka Kematian Balita (dibawah 5 tahun) tercatat sebesar 49,04 artinya setiap 1.000 balita di Papua, 49-50 balita tidak berhasil mencapai umur tepat 5 tahun.

5. Migrasi

Migrasi Masuk di Papua mencapai 10,96 artinya 11 dari 100 penduduk Papua tinggal di luar tempat kelahirannya. Untuk migrasi keluar di Papua mencapai 2,83. Migrasi risen di Papua mencapai 0,98 artinya 1 dari 100 penduduk di Papua tinggal di Provinsi lain dalam 5 tahun terakhir.

6. Komuter

Di Papua, terdapat 0,14 persen komuter antar kabupaten/kota di Papua. Hal ini menunjukkan bahwa 1 orang dari 100 orang penduduk di Papua berusia 5 tahun keatas beraktivitas di luar kabupaten/kota tempat tinggalnya dan pergi pulang pada hari yang sama. Sebagian besar komuter berjenis kelamin laki-laki. (60,88 persen).

7. Disabilitas

Long Form SP 2020 juga mencatat informasi mengenai disabilitas. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan prevalensi disabilitas antara desa/kota maupun berdasarkan jenis kelamin.

8. Indikator Perumahan

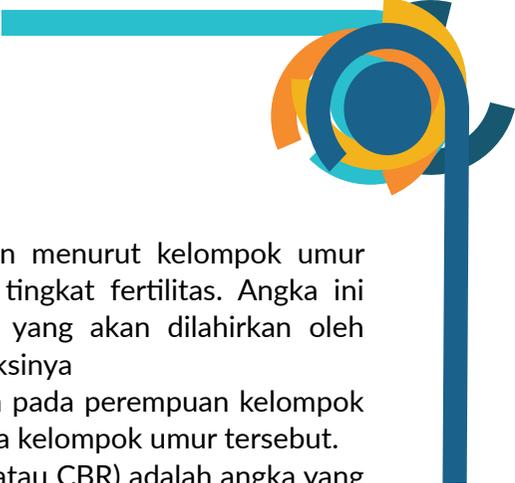
Rumah tangga yang menempati rumah yang memenuhi syarat ketahanan bangunan sebesar 72,27 persen. Dilihat menurut wilayah perkotaan maupun pedesaan, ketahanan bangunan di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan.

Persentase rumah tangga yang menempati rumah yang memenuhi ketahanan bangunan terdiri dari atap, dan lantai masing-masing sebesar 76,72 %; 98,32 %; dan 83,15 %.



SUMBER DATA

Data yang digunakan berasal dari hasil Longform SP 2020



PENJELASAN TEKNIS

- TFR adalah jumlah dari angka kelahiran menurut kelompok umur dan merupakan ringkasan ukuran dari tingkat fertilitas. Angka ini menggambarkan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita pada akhir masa reproduksinya
- ASFR menunjukkan banyaknya kelahiran pada perempuan kelompok umur tertentu per 1.000 perempuan pada kelompok umur tersebut.
- Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate* atau CBR) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama.
- Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan, tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan.
- Angka Kematian Bayi (AKB) adalah kematian yang terjadi pada penduduk yang berumur 0-11 bulan (kurang dari 1 tahun).
- Migrasi merupakan kegiatan perpindahan penduduk antar wilayah dalam jangka waktu tertentu, dengan melibatkan perubahan tempat tinggal. Penduduk yang wilayah tempat tinggalnya pada saat pelaksanaan sensus/survei berbeda dengan wilayah tempat lahir merupakan migran seumur hidup. Besaran migran seumur hidup dalam suatu populasi dikenal sebagai angka migrasi seumur hidup.
- Komuter/pelaju adalah seseorang yang melakukan suatu kegiatan bekerja/bersekolah dikabupaten/kota yang berbeda dengan tempat tinggalnya dan secara rutin pergi-pulang (pp)/nglaju/ulang alik pada hari yang sama.
- Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Undang-Undang No. 8 Tahun 2016).

"Persentase penduduk miskin Provinsi pada Maret 2023 sebesar 26,03 persen, turun 0,77 persen poin dibanding September 2022"

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua pada Maret 2023 mencapai 915,15 ribu orang. Dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin menurun 21,2 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2021, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 8,17 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebesar 26,80 persen, naik 0,24 persen poin terhadap Maret 2022 dan turun 0,58 persen poin terhadap September 2021.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2022–Maret 2023, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 4,6 ribu orang sedangkan di perdesaan turun sebesar 25,8 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik 0,39 persen poin dari 5,29 persen di September 2022 menjadi 5,68 persen pada Maret 2023. Persentase kemiskinan di perdesaan, turun 4,49 persen poin dari 35,68 persen pada September 2022 menjadi 34,49 persen pada Maret 2023.

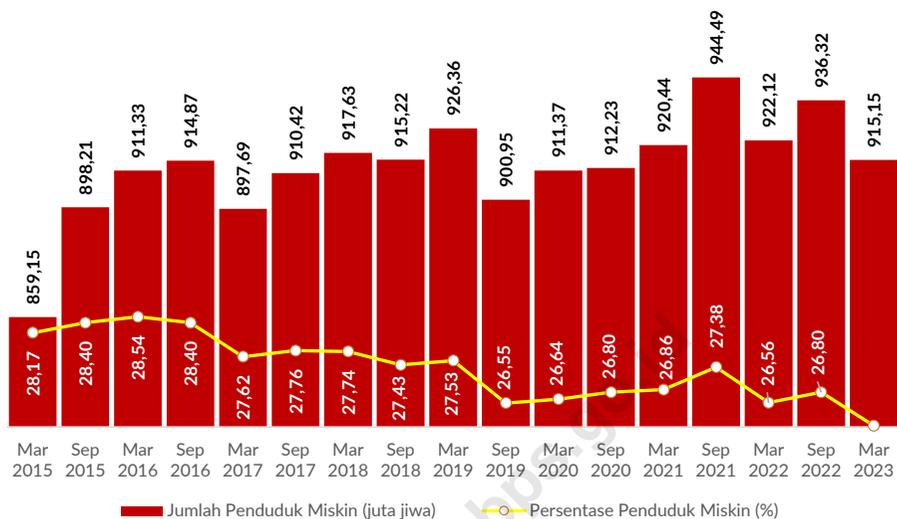
Provinsi Papua merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi sebesar 26,80 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin terendah di Provinsi Bali, yaitu sebesar 4,25 persen. Secara nasional, persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 25,89 juta orang.

Garis Kemiskinan pada Maret 2023 adalah sebesar Rp 669.469,- per kapita per bulan. Dibandingkan September 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,55 persen. Sementara jika dibandingkan Maret 2022, terjadi kenaikan sebesar 9,10 persen.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada Maret 2023 sumbangan GKM terhadap GK perkotaan sebesar 67,98 persen dan terhadap GK perdesaan sebesar 78,60 persen. Sedangkan GKNM



Gambar 2. Penduduk Miskin Provinsi Papua Maret 2015–Maret 2023



terhadap GK perkotaan dan perdesaan masing-masing hanya menyumbang sebesar 32,01 persen dan 21,40 persen.

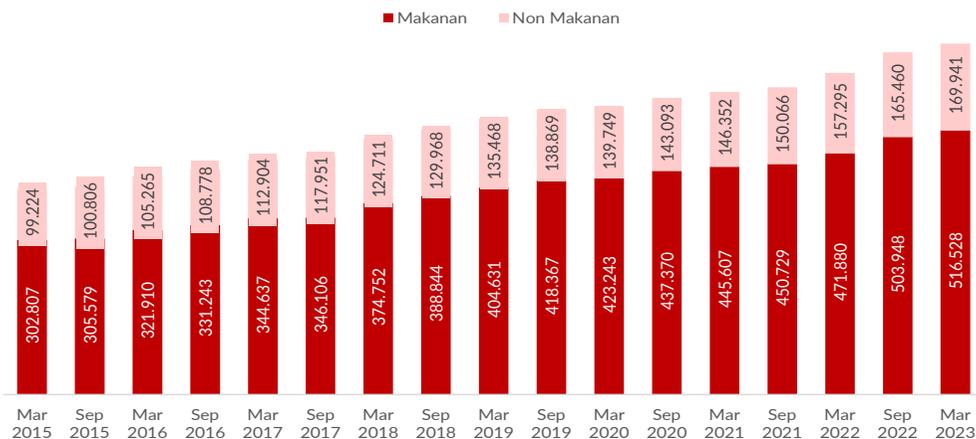
Garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Secara rata-rata, rumah tangga miskin di Provinsi Papua memiliki anggota rumah tangga sebanyak 4 hingga 5 orang (4,98 orang). Dengan garis kemiskinan sebesar Rp 686.469,- maka rata-rata garis kemiskinan per rumah tangga pada Maret 2023 adalah sebesar Rp3.418.616,-/bulan naik sebesar 8,94 persen dibanding kondisi September 2022 yang sebesar Rp3.112.747,-/bulan.

Pada periode September 2022-Maret 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2022 sebesar 7,285 turun 1,001 menjadi 6,284 pada Maret 2023 dan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan dari 2,818 menjadi 2,149.

Tabel 1. Garis Kemiskinan Menurut Klasifikasi Wilayah di Provinsi Papua Maret 2015–Maret 2023

Periode (1)	Garis Kemiskinan (Per Kapita Per Bulan)		
	Kota (2)	Desa (3)	K+D (4)
Mar-15	440.697	388.095	402.031
Sep-15	445.057	392.446	406.385
Mar-16	466.985	412.991	427.176
Sep-16	479.294	425.264	440.021
Mar-17	498.368	441.287	457.541
Sep-17	508.403	446.994	464.056
Mar-18	542.542	482.000	499.643
Sep-18	566.903	499.615	518.811
Mar-19	588.744	520.117	540.099
Sep-19	603.458	538.088	557.236
Mar-20	611.115	542.695	562.992
Sep-20	622.346	562.412	580.463
Mar-21	634.703	573.510	591.959
Sep-21	643.071	582.157	600.795
Mar-22	676.775	608.205	629.175
Sep-22	723.346	646.116	669.408
Mar-23	743.289	661.946	686.469

Gambar 3. Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan Provinsi Papua Mar 2015–Mar 2023 (rupiah)



PENJELASAN TEKNIS

- Pengukuran kemiskinan berdasarkan konsep memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur melalui garis kemiskinan.
- Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
- Garis kemiskinan terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan garis kemiskinan dilakukan berdasarkan daerah perkotaan dan pedesaan.
- Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kalori per kapita per hari yang diwakili 52 jenis komoditas. Garis Kemiskinan Bukan Makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.
- Indeks kedalaman kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menggambarkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.
- Garis kemiskinan per rumah tangga dihitung dari garis kemiskinan per kapita dikalikan dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin.



SUMBER DATA

Data yang digunakan berasal dari data SUSENAS MARET 2022



Ketimpangan **4**

"Gini Ratio Maret 2023 tercatat sebesar 0,386"

Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Papua yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,386. Angka ini menurun sebesar 0,007 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* September 2022 yang sebesar 0,393.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,300 naik dibanding *Gini Ratio* September 2022 yang sebesar 0,294 dan turun jika dibandingkan *Gini Ratio* Maret 2022 yang sebesar 0,315. Sementara itu, *Gini Ratio* di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,403 turun dibanding *Gini Ratio* September 2022 yang sebesar 0,419 dan sama dengan *Gini Ratio* Maret 2022 yang sebesar 0,427.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, pada Maret 2023 distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 16,38 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan sedang/menengah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 21,77 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 16,16 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan sedang/menengah.

Gini Ratio jika dilihat menurut provinsi, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai nilai *Gini Ratio* tertinggi yaitu sebesar 0,449. Sementara *Gini Ratio* terendah tercatat di Provinsi Bangka Belitung dengan *Gini Ratio* sebesar 0,245. Jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* nasional yang sebesar 0,388, terdapat enam provinsi dengan angka *Gini Ratio* lebih tinggi, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (0,449), DKI Jakarta (0,431), Jawa Barat (0,425), Gorontalo (0,417).

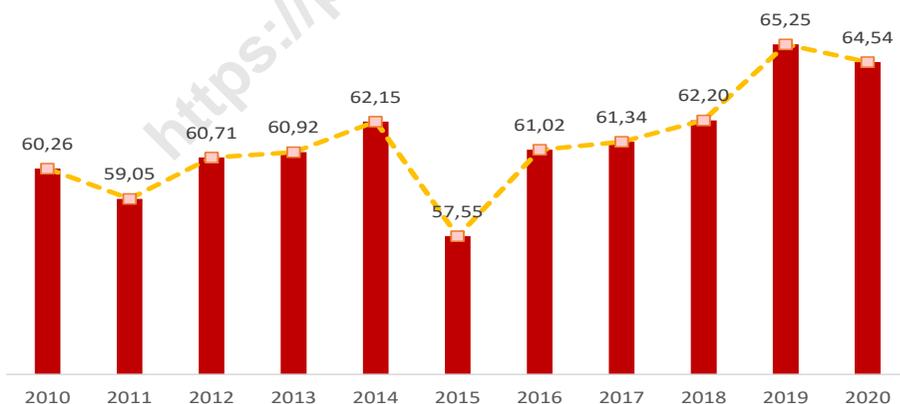
5 Indeks Demokrasi Indonesia

"IDI Provinsi Papua 2020 mencapai angka 64,54 yang berarti bahwa capaian kinerja demokrasi Indonesia pada kategori sedang"

IDI Provinsi Papua tahun 2020 sebesar 64,54 turun 0,71 poin dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 65,25. Kondisi ini menempatkan kinerja demokrasi Papua masih berada pada kategori 'sedang'.

IDI dari 2019–2020, aspek Kebebasan Sipil merupakan satu-satunya yang mengalami penurunan sebesar 3,76 poin (dari 93,08 menjadi 89,32), sedangkan aspek Hak-hak Politik meningkat sebesar 0,67 poin (dari 51,16 menjadi 51,83) dan aspek Lembaga Demokrasi juga meningkat sebesar 0,93 poin (dari 52,61 menjadi 53,54).

Gambar 4. Indeks Demokrasi Provinsi Papua, 2010-2020



PENJELASAN TEKNIS

- Aspek demokrasi yang dihitung dalam penyusunan IDI adalah Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).
- Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data diantaranya, *review* surat kabar lokal, *review* dokumen (Perda, Pergub,dll), *Focus Grup Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam.



Ketenagakerjaan

"Februari 2023, TPAK Papua sebesar 76,79 persen dan TPT sebesar 3,49 persen"

Penduduk usia kerja di Papua berjumlah 3,27 juta orang pada Februari 2023, naik sejumlah 45,19 ribu orang jika dibandingkan Februari 2022. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 2,51 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 758,41 ribu orang.

TPAK Papua pada Februari 2023 sebesar 76,79 persen, turun 3,44 persen poin dibandingkan Februari 2022. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 85,86 persen lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan sebesar 66,26 persen. Dibandingkan Februari 2022, TPAK baik laki-laki maupun perempuan mengalami penurunan, masing-masing sebesar 1,62 persen poin dan 5,55 persen poin.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Papua pada Februari 2023 sebesar 3,49 persen, turun 0,11 persen poin dibandingkan kondisi Februari 2022. TPT laki-laki sebesar 3,80 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,03 persen. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT di perkotaan (8,61 persen) jauh lebih tinggi dari TPT di daerah perdesaan (1,89 persen).

Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu: a) Pengangguran Karena COVID-19; b) Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena COVID-19; Sementara Tidak Bekerja Karena COVID-19; dan d) Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena COVID-19. Kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi COVID-19 pada mereka yang berhenti bekerja, sedangkan kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja.

Total penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 pada Februari 2023 sebanyak 24,22 ribu orang, mengalami penurunan sebanyak 36,17 ribu orang atau sebesar 59,90 persen dibandingkan dengan Februari 2022.



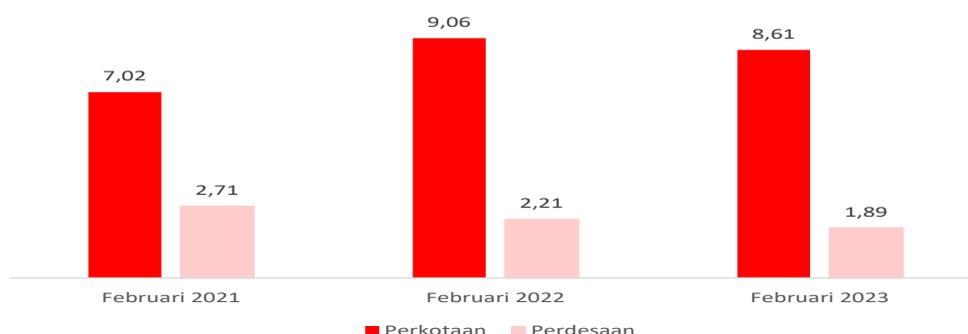
Tabel 2. Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja serta Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja di Provinsi Papua

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2021	Februari 2022	Februari 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk Usia Kerja (ribu jiwa)	2.494,28	3.221,86	3.267,05
Angkatan Kerja (ribu jiwa)	1.832,28	2.584,86	2.508,64
Bekerja (ribu jiwa)	1.763,18	2.491,80	2.421,12
Penganggur (ribu jiwa)	69,10	93,06	87,51
Bukan Angkatan Kerja (ribu jiwa)	662,00	637,00	758,41
TPT (%)	3,77	3,60	3,49
Laki-laki (%)	4,56	3,87	3,80
Perempuan (%)	2,58	3,22	3,03
TPAK (%)	73,47	80,23	76,79
Laki-laki (%)	83,58	87,48	85,86
Perempuan (%)	62,06	71,81	66,26
Komponen	ribu jiwa	ribu jiwa	ribu jiwa
a. Pengangguran ¹ Karena COVID-19	1,69	3,83	0,09
b. Bukan Angkatan Kerja (BAK) ² Karena COVID-19	1,70	0,22	0,00
c. Sementara Tidak Bekerja ³ Karena COVID-19	0,63	0,83	0,96
d. Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena COVID-19	114,18	55,50	23,17
Total	118,20	60,39	24,22

Keterangan:

1. Pengangguran Karena COVID-19 adalah penganggur yang pernah berhenti bekerja karena COVID-19 sejak Februari 2020
2. Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena COVID-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja dan pernah berhenti bekerja karena COVID-19 sejak Februari 2020
3. Sementara Tidak Bekerja Karena COVID-19 adalah penduduk bekerja namun karena COVID-19 menjadi sementara tidak bekerja

Gambar 5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Klasifikasi Wilayah Februari 2021 - Februari 2023 (%)





PENJELASAN TEKNIS

- Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik mengacu *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh *International Labor Organization* (ILO). Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja.
- Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk usia kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif di pasar kerja, baik dengan bekerja, mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Ukuran ini merupakan indikasi relatif dari pasokan tenaga kerja tersedia yang terlibat dalam produksi barang dan jasa.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase pengangguran terhadap angkatan kerja.



7 Indeks Pembangunan Manusia

"IPM Provinsi Papua tahun 2022 sebesar 61,39 dengan status pembangunan berada di kategori sedang"

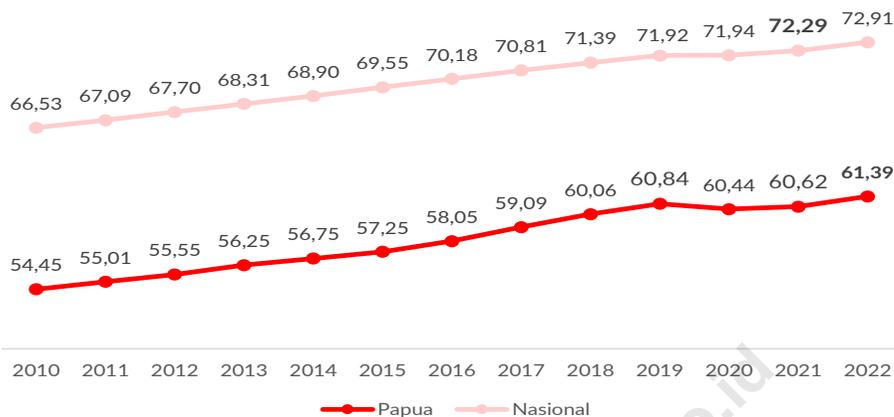
Indeks Pembangunan Manusia Papua tahun 2022 kembali meningkat sebesar 0,77 poin menjadi 61,39. Peningkatan ini sejalan dengan IPM Indonesia yang juga membaik pada tahun 2022. IPM Indonesia tahun 2010-2022 meningkat sebesar 0,77 persen per tahun menjadi 72,91 jika dibanding dengan periode sebelumnya. Peningkatan IPM Provinsi Papua tahun 2021 terjadi karena meningkatnya seluruh komponen penyusun IPM Provinsi Papua tahun 2022. Pada periode 2010-2022, komponen Umur Harapan Hidup (UHH) naik 0,30 persen menjadi 66,23 tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) naik 0,03 tahun menjadi 11,14 tahun, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) naik 0,26 tahun menjadi 7,02 tahun, dan Pengeluaran per kapita yang disesuaikan naik 2,75 persen menjadi Rp 7,146 juta per tahun.

Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua juga mengalami peningkatan angka IPM pada tahun 2022. Kondisi ini jauh semakin membaik dibandingkan tahun 2020 yang lalu dimana IPM pada hampir separuh kabupaten/kota di Papua menurun.

Pada tahun 2022, status IPM Kota Jayapura masih tetap berada pada kategori "Sangat Tinggi", setelah sempat turun pada tahun 2020 yang lalu. Capaian ini sekaligus menjadikan Kota Jayapura sebagai satu-satunya wilayah di Papua dengan status IPM sangat tinggi. Sementara, ada 4 kabupaten dengan status IPM "Tinggi" yaitu Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, Mimika, dan Merauke. Untuk kabupaten/kota dengan status IPM "Sedang" ada sebanyak 7 kabupaten yaitu Nabire, Kepulauan Yapen, Keerom, Waropen, Sarmi, Supiori dan Boven Digoel. Sementara itu, sebagian besar kabupaten status "Rendah" sebanyak 17 kabupaten yaitu, Mappi, Jayawijaya, Paniai, Dogiyai, Mamberamo Raya, Asmat, Deiyai, Tolikara, Yahukimo, Yalimo, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Intan Jaya, Mamberamo Tengah, Pegunungan Bintang, Puncak, Nduga.

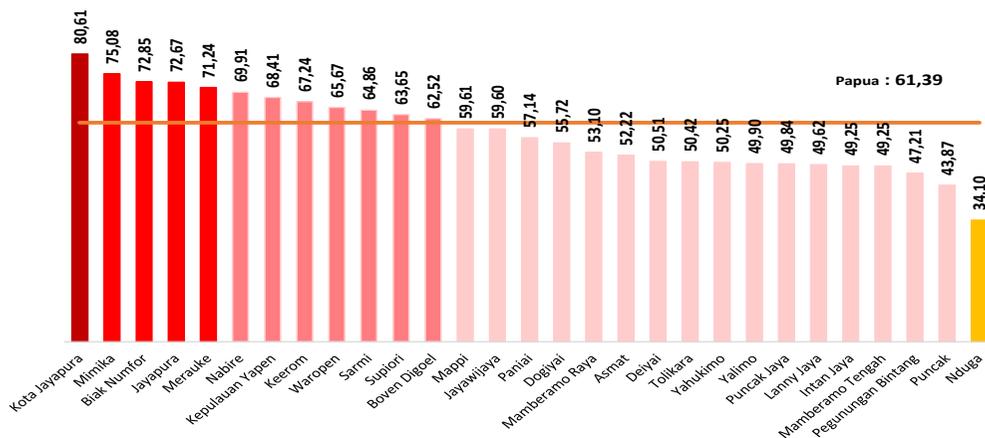
Kabupaten Nduga merupakan kabupaten dengan IPM terendah di Papua hanya sebesar 34,10. Sedangkan Kota Jayapura sebagai ibukota Provinsi Papua tercatat memiliki pembangunan

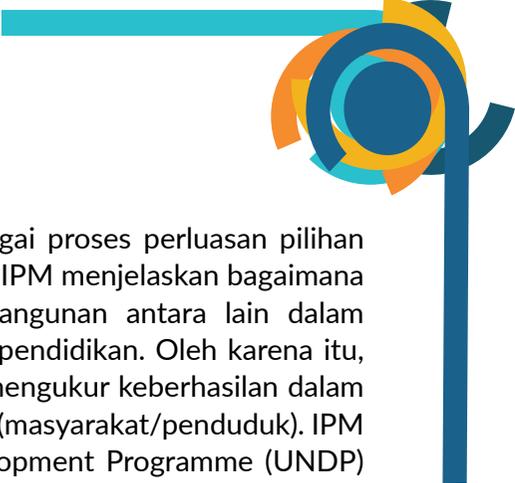
Gambar 6. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Nasional dan Papua Tahun 2010–2022



manusia tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya di Papua. Kabupaten/kota dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat yaitu: Kabupaten Nduga (3,84 persen), Pegunungan Bintang (2,01 persen), dan Lanny Jaya (1,93 persen). Sedangkan kabupaten/kota yang mengalami peningkatan paling kecil yaitu Kota Jayapura (0,62 persen), Biak Numfor (0,72 persen) dan Paniai (0,78 persen). Secara nasional, peningkatan IPM tercermin pada level provinsi. Selama periode 2021 hingga 2022, seluruh provinsi mengalami peningkatan IPM. Provinsi dengan kemajuan pembangunan paling cepat yaitu: Provinsi Papua (1,27 persen), Nusa Tenggara Barat (1,18 persen), dan Gorontalo (1,17 persen). Sementara, provinsi yang mengalami peningkatan paling kecil yakni Daerah Istimewa Yogyakarta (0,52 persen), Kalimantan Tengah (0,53 persen) dan DKI Jakarta (0,67 persen).

Gambar 7. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua, 2022





PENJELASAN TEKNIS

- Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging people's choice). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan antara lain dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting sejak tahun 2010.
- IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life); pengetahuan (knowledge); dan standar hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan dengan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.
- Dimensi pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Dimana Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, dan Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sementara itu, standar hidup layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.
- Status pembangunan manusia dibedakan atas 4 yaitu Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang dan Rendah.

Indeks Kebahagiaan **8**

"Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua tahun 2021 sebesar 69,87"

Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua tahun 2021 sebesar 69,87, lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yang hanya 67,52. Jika dilihat dari masing-masing dimensi penyusunnya, Indeks Kepuasan Hidup tahun 2021 sebesar 73,23, lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yang hanya 71,07. Demikian juga dengan masing-masing subdimensinya, Subdimensi Kepuasan Hidup Personal tahun 2021 sebesar 68,95 lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yang hanya 65,98 dan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial tahun 2021 sebesar 77,50, lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 sebesar 76,16. Sedangkan pada Indeks Perasaan (*Affect*) tahun 2021 sebesar 63,72, justru lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 68,59. Demikian juga dengan Indeks Dimensi Makna Hidup (*Eudaimonia*) tahun 2021 sebesar 72,07, lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 72,23. Seluruh indeks diukur pada skala 0-100.

PENJELASAN TEKNIS

- Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua merupakan indeks komposit yang dihitung secara tertimbang menggunakan dimensi dan indikator dengan skala 0-100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan penduduk yang semakin bahagia. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka semakin merasa tidak bahagia.
- Indeks kebahagiaan tahun 2021 diukur dengan tolok ukur tahun 2017. Penilaian terhadap tingkat kebahagiaan memerlukan sebuah kerangka kerja yang mencakup 19 (sembilan belas) indikator, yang tercakup dalam 3 (tiga) dimensi kehidupan, yaitu (1) Dimensi Kepuasan Hidup (*Life Satisfaction*), (2) Dimensi Perasaan (*Affect*), dan (3) Dimensi Makna Hidup (*Eudaimonia*). Dimensi kepuasan hidup dibedakan menjadi subdimensi kepuasan hidup personal dan kepuasan hidup sosial. Sehingga, hasil indeks pada tahun 2021 ini memiliki keterbandingan dengan tahun 2017, namun tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2014, karena memiliki nilai kontribusi yang berbeda antar indikator.



Tabel 3. Indeks Kebahagiaan dan Indeks Dimensi Menurut Karakteristik 2021

Karakteristik	Indeks Kebahagiaan	Penyusun Indeks Kebahagiaan				
		Indeks Dimensi Kepuasan Hidup			Indeks Dimensi Perasaan (Affect)	Indeks Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia)
		Indeks Subdimensi Kepuasan Hidup		Total		
(1)	(2)	Personal	Sosial	(5)	(6)	(7)
Klasifikasi Wilayah						
Perkotaan	72,83	74,10	78,96	76,53	65,66	75,62
Perdesaan	68,72	66,95	76,92	71,94	62,97	70,69
Jenis Kelamin						
Laki-Laki	69,47	67,83	76,85	72,34	64,00	71,56
Perempuan	70,73	71,39	78,90	75,15	63,13	73,19
Status Perkawinan						
Belum Menikah	69,72	70,28	76,58	73,43	61,21	73,73
Menikah	70,24	69,27	77,72	73,49	64,31	72,36
Cerai Hidup	66,84	66,77	75,66	71,21	58,71	69,82
Cerai Mati	68,32	67,11	76,82	71,97	62,00	70,37
Kelompok Umur						
≤ 24 Tahun	68,56	66,47	77,09	71,78	62,60	70,73
25-40 Tahun	69,34	68,62	76,60	72,61	62,94	71,84
41-64 Tahun	70,35	69,29	78,13	73,71	64,50	72,26
≥ 65 Tahun	70,51	69,94	79,25	74,59	63,20	73,02
Kedudukan Dalam Rumah Tangga:						
Kepala Rumah Tangga	69,42	67,96	77,02	72,49	63,66	71,55
Pasangan KRT	71,77	73,11	79,51	76,31	63,97	74,25
Banyaknya Anggota Rumah Tangga:						
1 Orang	67,69	67,18	74,83	71,01	60,70	70,71
2 Orang	69,25	69,43	77,25	73,34	62,38	71,36
3 Orang	69,36	67,89	77,12	72,51	63,79	71,26
4 Orang	70,59	69,65	77,32	73,48	64,95	72,78
5 Orang atau Lebih	70,57	69,38	78,70	74,04	64,25	72,82
Pendidikan Tertinggi						
Tidak pernah sekolah	66,15	62,38	75,25	68,82	61,23	67,92
Tidak tamat SD/ sederajat	70,68	68,03	79,23	73,63	66,19	71,78
SD sederajat	69,89	69,27	78,37	73,82	63,16	72,03
SMP sederajat	68,73	67,08	75,67	71,37	63,96	70,38
SMA sederajat	71,87	73,38	78,55	75,96	63,91	74,96
Diploma I, II, III	72,06	75,71	77,59	76,65	60,67	77,81
Diploma IV/S1	76,89	80,09	80,75	80,42	69,89	79,69
S2, S3	82,69	83,72	87,85	85,79	75,95	85,68
Pendapatan Rata						
Hingga Rp 1.800.000	66,68	61,38	76,04	68,71	62,91	68,05
Rp 1.800.001 - Rp 3.000.000	70,38	69,00	78,50	73,75	64,38	72,43
Rp 3.000.001 - Rp 4.800.000	70,38	70,91	77,71	74,31	63,30	72,85
Rp 4.800.001 - Rp 7.200.000	72,16	75,54	77,92	76,73	63,63	75,31
Lebih Dari Rp. 7.200.000	73,74	77,50	78,53	78,02	65,64	76,79
Papua	69,87	68,95	77,50	73,23	63,72	72,07

Potensi Desa (PODES)

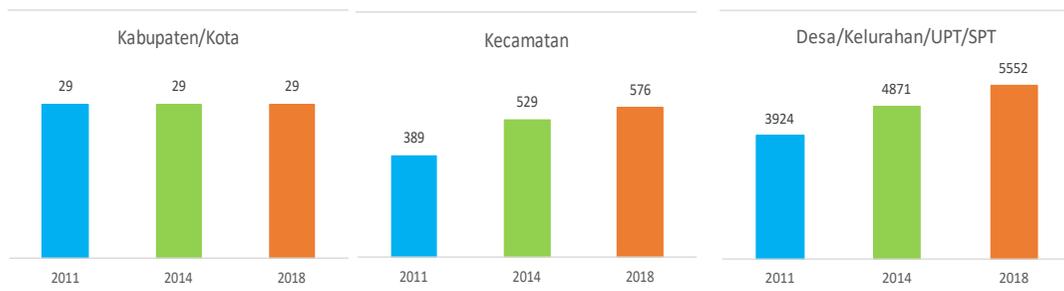


"Tahun 2018, di Provinsi Papua terdapat 5.456 desa, 96 kelurahan, 576 kecamatan, dan 29 kabupaten/kota"

Jumlah desa mandiri di Provinsi Papua sebanyak 10 desa (0,18 persen), 693 desa berkembang (12,70 persen), dan 4.753 desa tertinggal (87,12 persen). Rata-rata IPD Provinsi Papua untuk Dimensi Transportasi 56,96; Dimensi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 52,30; Dimensi Pelayanan Umum 41,67 persen; Dimensi Pelayanan Dasar 25,05; dan Dimensi Kondisi Infrastruktur 18,49.

Podes 2018 mencatat ada 40 desa wisata di Provinsi Papua, meningkat dari tahun 2014 yang hanya 17 desa wisata. Pada bidang ekonomi, peningkatan terjadi pada desa/kelurahan yang memiliki Industri Kecil dan Mikro. Peningkatan terbesar terjadi pada Industri Makanan dan Minuman sebesar 77 persen (menjadi 244 desa/kelurahan). Pada sarana ekonomi lainnya juga terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2014. Desa/kelurahan dengan keberadaan warung/toko kelontong, pasar dengan bangunan (permanen dan semi permanen), hotel/penginapan, toko/warung kelontong.

Gambar 8. Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan UPT/SPT Hasil PODES Provinsi Papua Tahun 2011, 2014 dan 2018

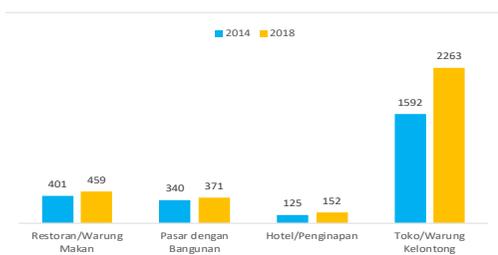


Pada bidang kesehatan, desa dengan penyelenggaraan kegiatan posyandu sebulan sekali meningkat 18 persen dibandingkan tahun 2014 menjadi 2.012 desa/kelurahan. Desa/kelurahan dengan keberadaan puskesmas dan puskesmas pembantu masing-masing meningkat 9 persen (menjadi 422 desa/kelurahan) dan 17 persen (menjadi 1.146 desa/kelurahan). Pada bidang perumahan dan lingkungan hidup ada beberapa peningkatan dibandingkan tahun 2014. Desa dengan/kelurahan dengan keberadaan pengguna listrik meningkat 39 persen (menjadi 4.050 desa/kelurahan). Desa/kelurahan

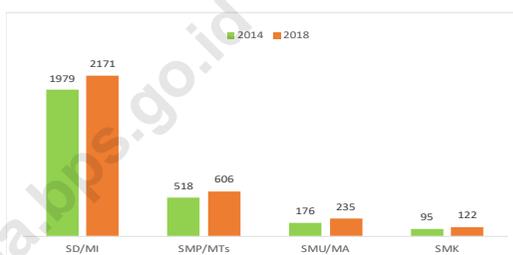
dengan keberadaan pengguna sumber air bersih untuk minum meningkat 12 persen (menjadi 3.906 desa/kelurahan). Desa/kelurahan dengan keberadaan pengguna jamban sebagai fasilitas buang air besar meningkat sebesar 44 persen (menjadi 3.020 desa/kelurahan).

Pada bidang pendidikan, desa dengan keberadaan SD/MI sampai dengan SMU/MA dan SMK mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi pada keberadaan SMU/MA. Dari segi pendidikan kepala desa/lurah, ada 1.817 kepala desa/lurah berpendidikan minimal SMU/ sederajat (meningkat 33 persen dibandingkan tahun 2014).

Gambar 9. Perkembangan Sarana Sektor Ekonomi Provinsi Papua, 2014 dan 2018



Gambar 10. Perkembangan Sarana Sektor Pendidikan Provinsi Papua, 2014 dan 2018



PENJELASAN TEKNIS

- Podes 2018 dilaksanakan pada Mei 2018 secara sensus terhadap seluruh Desa/ Kelurahan/Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT), Kecamatan, Kabupaten/Kota. Wilayah tersebut harus memenuhi tiga (3) syarat, yaitu: 1) ada wilayah 2) ada penduduk, dan 3) ada pemerintahan desa.
- Indeks Pembangunan Desa (IPD) adalah indeks komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa pada suatu waktu. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Indeks Pembangunan Desa terdiri dari lima (5) dimensi yaitu 1) Pelayanan Dasar, 2) Kondisi Infrastruktur, 3) Aksesibilitas/Transportasi, 4) Pelayanan Umum, dan 5) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Tingkat perkembangan desa menurut IPD dikategorikan kedalam tiga (3) status yaitu: Desa Mandiri, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal. Semakin tinggi IPD menunjukkan semakin mandiri desa tersebut.
- Data podes 2018 berupa potensi desa/kelurahan yang disajikan terkait bidang pariwisata yaitu potensi wisata di desa/kelurahan, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang perumahan dan lingkungan hidup serta bidang pendidikan.

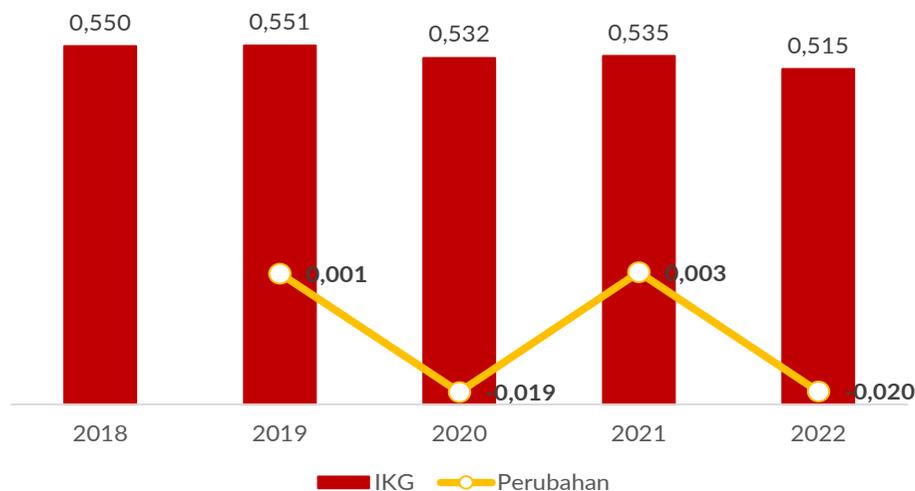
Indeks Ketimpangan Gender **10**

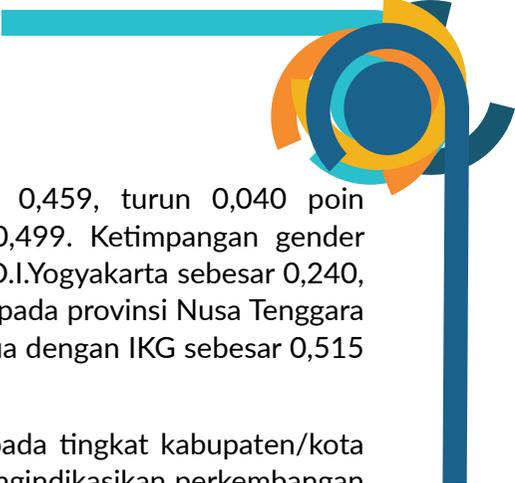
"Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Papua tahun 2022 sebesar 0,515, turun 0,020 poin dibandingkan 2021"

Ketimpangan gender Papua sejak tahun 2018 hingga 2022 secara konsisten menurun. Sejak tahun 2018, IKG berkurang sebesar 0,035 poin, rata-rata turun 0,00875 poin per tahun. Hal ini mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin mengecil atau kesetaraan yang semakin membaik.

Penurunan ketimpangan gender terbesar terjadi pada tahun 2022 yang turun 0,020 poin dan utamanya dipengaruhi oleh menurunnya ketimpangan pada dimensi kesehatan reproduksi dan pemberdayaan. Pada dimensi kesehatan reproduksi, indikator wanita melahirkan tidak di fasilitas kesehatan turun dari 34,8 persen tahun 2021 menjadi 28,2 persen pada tahun 2022. Sedangkan pada dimensi pemberdayaan, keterwakilan perempuan di legislatif meningkat dari 14,55 persen pada tahun 2021 menjadi 15,94 persen pada tahun 2022. Persentase perempuan 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas meningkat dari 26,44 persen tahun 2021 menjadi 30,80 persen pada tahun 2022 dan persentase laki-laki meningkat dari 36,70 persen pada tahun 2021 menjadi 38,80 persen pada tahun 2022.

Gambar 11. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Papua, 2018-2022





Pada tahun 2022, IKG Indonesia sebesar 0,459, turun 0,040 poin dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 0,499. Ketimpangan gender paling rendah pada tahun 2022 dicapai oleh D.I.Yogyakarta sebesar 0,240, sedangkan ketimpangan gender tertinggi ada pada provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 0,648. Sementara provinsi Papua dengan IKG sebesar 0,515 ada pada urutan ke-26.

Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada tingkat kabupaten/kota di Papua selama kurun waktu 2018-2022 mengindikasikan perkembangan ketimpangan gender yang semakin baik. Sebagian besar kabupaten/kota setiap tahun mengalami penurunan ketimpangan gender.

Pada tahun 2022, sebanyak 18 kabupaten/kota mengalami penurunan ketimpangan gender. Nduga mengalami penurunan ketimpangan gender paling tinggi, terutama disebabkan oleh perbaikan dimensi pemberdayaan. Keterwakilan legislatif perempuan pada tahun 2022 meningkat sebesar 8,00 persen poin dan persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas meningkat sebesar 2,50 persen poin, sementara laki-laki meningkat 0,35 persen poin.

PENJELASAN TEKNIS

- Penghitungan Indes Ketimpangan Gender (IKG) mengadopsi penghitungan *Gender Inequality Index (GII)* dari *United Nations Development Programme (UNDP)* dengan beberapa penyesuaian. Indikator *Maternal Mortality Rate (MMR)* atau *Angka Kematian Ibu (AKI)* didekati dengan indikator proporsi perempuan 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF). Untuk indikator *Adolecent Birth Rate (ABR)* yang digunakan oleh UNDP dalam penghitungan *GII* didekati dengan indikator proporsi perempuan berusia 15-49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20). Sementara itu, 3 (tiga) indikator lainnya sama dengan yang digunakan oleh UNDP dalam menyusun *GII*, yaitu persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas, persentase anggota legislatif, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).
- Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator MTF dan MHPK20, dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas dan persentase anggota legislatif, dan dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator TPAK.

EKONOMI DAN PERDAGANGAN



11 Inflasi

"Juli 2023, inflasi mtm sebesar 0,10 persen, inflasi ytd sebesar 2,35 persen dan inflasi yoy sebesar 3,40 persen.

Indeks Harga Konsumen (IHK) di 3 kota pada Juli 2023, terjadi inflasi y-o-y sebesar 3,40 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 111,65 pada Juli 2022 menjadi 115,45 pada Juli 2023. Tingkat inflasi *month-to-month* sebesar 0,10 persen dan tingkat inflasi *year-to-date* sebesar 2,35 persen.

Jika dirinci menurut 3 kota HK dan inflasi mtm, maka pada Juli 2023 di Merauke terjadi deflasi sebesar 0,08 persen, Timika terjadi inflasi 0,83 persen dan Kota Jayapura deflasi sebesar 0,16 persen.

Sedangkan untuk inflasi yoy, terjadi inflasi sebesar 5,21 persen di Merauke, sebesar 4,93 persen di Timika dan Kota Jayapura mengalami inflasi 2,17 persen. Secara nasional, inflasi yoy tertinggi terjadi di Merauke sebesar 5,21 persen dan terendah di Gunung Sitoli sebesar 0,50 persen.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran dan kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi yoy (secara rinci dapat dilihat pada tabel 5).

Beberapa komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *year-on-year* pada Juli 2023, antara lain: bensin, beras, rokok kretek filter, biaya akademi/ perguruan tinggi, dan rokok putih. Sementara beberapa komoditas yang dominan memberikan andil deflasi *year-on-year* antara lain: minyak goreng, bawang merah, cabai rawit, ikan tongkol, dan daging ayam ras.

Tabel. 4 Tingkat inflasi Month to Month, Year To Date dan Year on Year tahun 2021-2023

No	Inflasi	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Month to Month (mtm) Juli	0,19	0,81	0,10
2	Year To Date (ytd) Juli	0,22	4,61	2,35
3	Year on Year (yoy) Juli	0,01	6,25	3,40

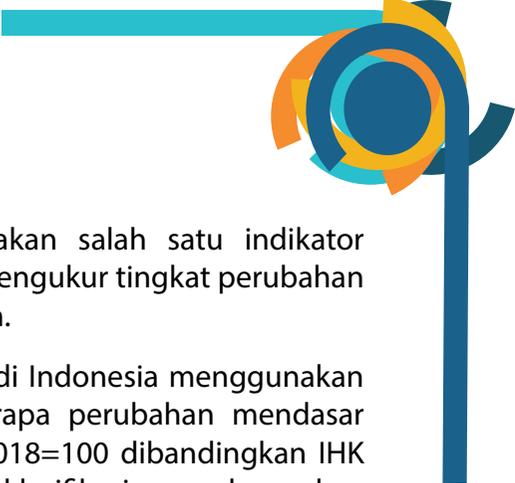
Tabel 5. IHK, Andil Inflasi, dan Inflasi Year on Year Gabungan 3 Kota IHK di Papua Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)

No	Kelompok	IHK Juli 2023	Inflasi Juli 2023 ¹⁾	Andil Inflasi	Inflasi Year-on-Year ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Umum	115,45	0,10	0,10	3,40
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	119,14	-0,31	-0,12	0,93
2	Pakaian dan Alas Kaki	103,84	0,06	0,00	0,05
3	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	104,48	-0,01	0,00	0,15
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	111,18	0,07	0,00	0,13
5	Kesehatan	112,52	0,01	0,00	0,02
6	Transportasi	134,84	0,98	0,13	1,18
7	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	100,75	-0,03	-0,002	-0,004
8	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	114,05	-0,38	-0,005	0,05
9	Pendidikan	118,71	3,35	0,125	0,37
10	Penyediaan Makanan dan Minuman / Restoran	112,05	0,04	0,00	0,18
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	120,22	-0,46	-0,03	0,34

Keterangan:

1) Persentase perubahan IHK Juli 2023 terhadap IHK Juni 2023

2) Persentase perubahan IHK Juli 2023 terhadap IHK Juni 2022



PENJELASAN TEKNIS

- Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen.
- Mulai Februari 2020, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018=100. Ada beberapa perubahan mendasar dalam penghitungan IHK tahun dasar 2018=100 dibandingkan IHK 2012=100, khususnya dari sisi cakupan, klasifikasi pengelompokan komoditas, metodologi penghitungan IHK, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2018 yang dilaksanakan oleh BPS Kota IHK di seluruh Indonesia, sebagai salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK. Hasil SBH 2018 mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang terjadi di Indonesia.
- SBH 2018 dilaksanakan di 90 kota, yang terdiri dari 34 ibu kota provinsi dan 56 kabupaten/kota. Dari 90 kota tersebut, 3 diantaranya berada di Provinsi Papua yang meliputi: Merauke, Timika, dan Kota Jayapura. Survei ini dilaksanakan di daerah perkotaan dengan mencatat seluruh pengeluaran rumah tangga setiap bulannya.
- Selain perubahan cakupan, IHK (2018=100) juga mengalami perubahan dari sisi pengelompokan komoditas. Pengelompokan komoditas didasarkan pada Classification of Individual Consumption According to Purpose (COICOP) 2018 dari sebelumnya menggunakan COICOP 1999. Klasifikasi COICOP 2018 yang digunakan dimodifikasi dari 13 divisi COICOP menjadi 11 kelompok IHK. Secara nasional pengelompokan komoditas terdiri dari 11 kelompok dan 43 subkelompok.
- Metode penghitungan IHK gabungan 3 kota di Papua pada 2018=100 menggunakan agregasi nilai konsumsi total seluruh kota. Adapun penghitungan rata-rata pada level komoditas menggunakan metode geometrik.

Produk Domestik Regional Bruto **12**

"Ekonomi Papua pada triwulan II-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 3,81 persen (y-o-y)"

Pada triwulan II-2023, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 71,08 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 44,97 triliun.

A. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Ekonomi Papua dengan Pertambangan dan Penggalian triwulan II-2023 dibanding triwulan I-2022 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 3,81 persen. Pertumbuhan ini terjadi pada 15 (lima belas) lapangan usaha, sedangkan 2 (dua) lapangan usaha lainnya yaitu Industri Pengolahan dan Jasa Kesehatan mengalami kontraksi. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 16,85 persen yang disebabkan karena meningkatnya output jasa perantara keuangan.

Secara q to q, ekonomi Papua pada triwulan II-2023 dibandingkan triwulan I-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 9,83 persen. Pertumbuhan ini disebabkan karena peningkatan produksi emas dan tembaga PT. Freeport Indonesia dan adanya hari raya keagamaan serta libur sekolah pergantian tahun ajar baru. Hanya ada satu lapangan usaha yang mengalami kontraksi yaitu lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang mengalami kontraksi sebesar -3,66 persen.

Ekonomi Papua Tanpa Pertambangan dan Penggalian triwulan II-2023 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 2,55 persen. Pertumbuhan ini disebabkan adanya perayaan hari raya besar keagamaan dan pergantian tahun ajaran baru.

B. PDRB Menurut Pengeluaran

Ekonomi Papua triwulan II-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 3,81 persen (y-on-y). Pertumbuhan terjadi pada semua komponen kecuali Ekspor Barang dan Jasa. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 7,55 persen. Sebaliknya, Komponen Ekspor Barang dan Jasa justru berkontraksi sebesar -2,61 persen. Selain itu, Komponen Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang



Tabel 6. Laju Pertumbuhan PDRB dengan Pertambangan dan Penggalian ADHB Menurut Beberapa Kategori Lapangan Usaha (persen)

No	Kategori	Laju Pertumbuhan Tw II-2023** terhadap Tw I-2023**	Laju Pertumbuhan Tw II-2023** terhadap Tw II-2022*	Distribusi ADHB Tw II-2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,38	2,18	10,30
2	Pertambangan dan Penggalian	21,01	3,01	39,58
3	Industri Pengolahan	1,63	-2,83	1,60
4	Konstruksi	0,03	5,85	13,20
5	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,18	4,87	9,20
6	Transportasi dan Pergudangan	3,68	9,85	4,50
7	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,25	3,01	8,48
8	Jasa Lainnya	2,85	2,12	0,95
	PDRB	9,83	3,81	100,00

Catatan: *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

PDRB tumbuh sebesar 2,17 persen.

Ekonomi Papua Triwulan II-2023 mampu tumbuh cukup tinggi yaitu sebesar 9,83 persen (*q-to-q*). Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar komponen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 86,98 persen. Sementara itu, Komponen PMTB mengalami kontraksi sebesar -0,99 persen, begitu juga, komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang PDRB mengalami kontraksi sebesar -2,07 persen.

Gambar 12. Pertumbuhan Ekonomi *y-on-y* Provinsi Papua, Triwulan I-2020 – Triwulan II-2023 (persen)



Tabel 7. Laju Pertumbuhan PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (persen)

No	Kategori	Tw II-2023** terhadap Tw I-2023* (q-to-q) (3)	Tw II-2023** terhadap Tw II-2022* (y-o-y) (4)	Sumber Perrtumbu- han Tw II-2023** (y-o-y) (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,82	4,89	1,85
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6,55	7,55	0,13
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,04	5,33	0,84
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	(0,99)	3,72	0,98
5	Ekspor Barang dan Jasa	86,98	(2,61)	(1,16)
6	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	(2,07)	2,17	0,56
	Produk Domestik Regional Bruto	9,83	3,81	3,81

Catatan: *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

PENJELASAN TEKNIS

- PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai dan barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha daerah.
- PDRB menggambarkan kondisi ekonomi suatu daerah dalam periode waktu tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun konstan.
- Untuk menghitung PDRB, digunakan 3 pendekatan yaitu Pendekatan Pendapatan, Pendekatan Produksi dan Pendekatan Pengeluaran.
- Data yang digunakan berasal dari survei-survei yang diselenggarakan BPS dan instansi terkait yang mengeluarkan data secara resmi.

13 Ekspor

"Juli 2023, ekspor Papua mencapai US\$257,43 juta"

A. Ekspor Migas dan Non Migas

Ekspor Papua pada Juli 2023 tercatat senilai US\$257,43 juta (turun 35,55 persen) dari bulan sebelumnya yang senilai US\$399,43 juta. Dilihat dari jenisnya, ekspor Papua pada bulan ini berupa ekspor migas senilai US\$6.429 juta dan ekspor non-migas senilai US\$257,42 juta. Ekspor terbesar bulan ini berasal dari Pelabuhan Amamapare yaitu senilai US\$251,45 juta (97,68 persen dari total ekspor Papua).

Dengan total ekspor Papua Januari-Juli sebesar US\$2.987,25 juta, menurun 15,74 persen dibandingkan total ekspor Januari-Juli 2022 yang sebesar US\$3.545,27 juta.

B. Ekspor Menurut Golongan Barang HS 2 Diji

Nilai ekspor golongan Bijih logam, terak, dan abu (HS26) pada Juli 2023 tercatat senilai US\$251,41 juta (turun 36,66 persen) dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang senilai US\$396,90 juta. Ekspor golongan Kayu dan Barang dari Kayu (HS44) senilai US\$1,45 juta. Ekspor golongan Ikan & Hewan Air Lainnya (HS03) sebesar US\$0,12 juta. Ekspor Non Migas Lainnya pada bulan ini senilai US\$4,44 juta.

C. Ekspor Menurut Negara Tujuan

Ekspor yang ditujukan ke enam negara utama pada Juli 2023 tercatat senilai US\$251,53 juta (turun 34,53 persen) dibandingkan Juni 2023 sebesar

Tabel 8. Ringkasan Perkembangan Ekspor Provinsi Papua Juni 2023

Uraian	Nilai FOB (Juta US\$)			%	%	%
	Mei 2023	Juni 2023*	Jan-Juni 2023*	Perubahan Juni 2023* thd Mei 2022	Perubahan Juni 2023* thd Juni 2022	Peran thd Total Impor Jan-Juni 2023*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Ekspor	620,42	399,43	2.729,82	-35,62	-13,62	100,00
Migas	0,00	0,00 ¹	0,00 ²	Undefined	Undefined	0,00
Non Migas	620,42	399,43	2.729,82	-35,62	-13,26	100,00

Ket:Tanda (*) menunjukkan Angka Sementara

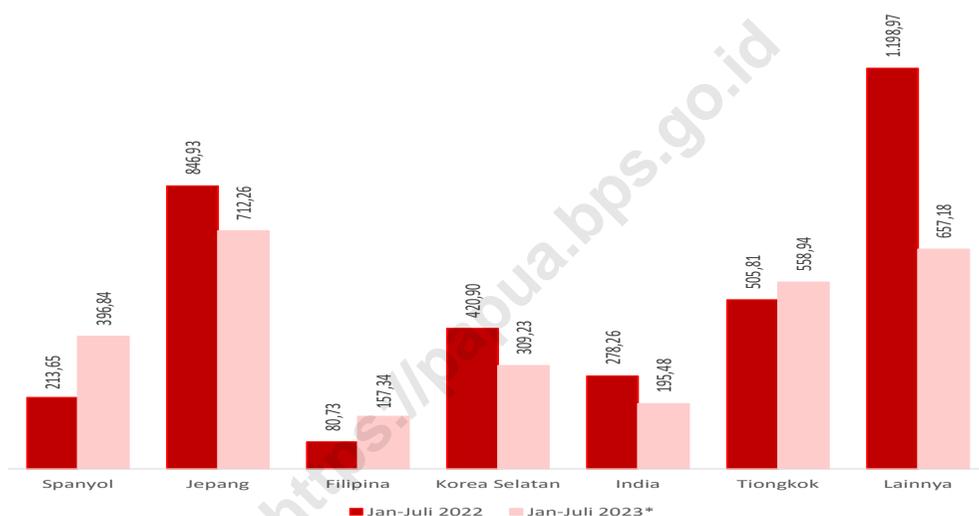
¹ US\$ 487

² US\$ 3.869

US\$15,25 juta. Sedangkan ekspor ke negara lainnya mencapai US\$5,90 juta (turun 61,33 persen) dibandingkan Juni 2023 senilai US\$384,18 juta.

Jepang menjadi negara tujuan ekspor terbesar dengan nilai ekspor senilai US\$126,50 juta, dimana komoditi yang diekspor berupa golongan Bijih logam, terak, dan abu (HS26) dan golongan Ikan & Hewan Air Lainnya (HS03). Sementara itu, Ekspor ke negara tetangga Papua Nugini senilai US\$4,41 juta. Ekspor ke enam negara utama memberikan andil 78 persen terhadap total ekspor Papua pada Januari-Juli 2023.

Gambar 13. Nilai Ekspor Provinsi Papua Menurut Negara Tujuan Januari-Juli 2023* (Juta US\$)



Ket:Tanda (*) menunjukkan Angka Sementara

D. Ekspor Menurut Pelabuhan Muat

Ekspor Papua pada Juli 2023 melalui empat pelabuhan ekspor di Papua yaitu Pelabuhan Amamapare, Bandara Sentani, Pelabuhan Jayapura dan Bandara Frans Kaisepo di Biak. Ekspor terbesar berasal dari pelabuhan Amamapare senilai US\$251,45 juta, Pelabuhan Serui senilai US\$1,45 juta, Bandara Frans Kaisepo di Biak US\$0,12 juta dan Pelabuhan Jayapura senilai US\$4,41 juta.

E. Ekspor Melalui Pelabuhan di luar Papua

Selain diekspor melalui pelabuhan ekspor di Papua, barang ekspor Papua dimuat di luar Papua. Senilai US\$4,01 juta di muat di Pelabuhan Tanjung Perak yang seluruhnya berasal dari golongan Kayu dan Barang dari Kayu (HS44) . Kemudian, di Bandara Cengkareng dimuat barang ekspor senilai US\$0,03 juta dari golongan Perkakas (HS82), golongan ikan, krustasea, & moluska (HS03), golongan Barang-barang rajutan (HS61), dan golongan Kayu dan Barang dari Kayu (HS44). Ekspor dari golongan Kayu dan Barang dari Kayu (HS44) mempunyai andil sebesar 99,23 persen.



PENJELASAN TEKNIS

- Nilai ekspor adalah jumlah nilai Free On Board (FOB) seluruh barang ekspor yang keluar dari daerah pabean Indonesia.
- Free on Board adalah nilai barang sampai pelabuhan muat setelah barang dimuat di kapal.
- Negara tujuan adalah negara tujuan akhir yang diketahui dimana barang tersebut akan dikonsumsi atau diperdagangkan.
- Enam negara tujuan utama ekspor di Papua terdiri atas Spanyol, Jepang, Filipina, Korea Selatan, India, Tiongkok.
- Pelabuhan muat ekspor adalah pelabuhan dimana barang bergerak ke luar negeri. Pelabuhan muat di Papua yaitu Pelabuhan Jayapura, Pelabuhan Serui, Pelabuhan Amamapare, Bandara Sentani dan Pelabuhan Bade.
- Provinsi asal barang adalah provinsi dimana barang tersebut diproduksi atau disimpan/ditimbun untuk diekspor.

<https://papua.usg.gov>

"Juli 2023, Impor Papua senilai US\$46,85 juta"

A. Impor Migas dan Non Migas

Impor Papua pada Juli 2023 tercatat senilai US\$46,85 juta berupa impor migas senilai US\$18,50 juta dan impor nonmigas senilai US\$28,35 juta. Nilai impor Papua bulan ini meningkat 55,77 persen.

Komoditi nonmigas yang memiliki nilai impor terbesar berasal dari golongan Barang-barang dari besi dan baja (HS73) yang memiliki nilai US\$9,54 juta atau sebesar 40,31 persen dari total nilai impor komoditi non migas utama.

B. Impor Menurut Golongan Barang HS 2 Dijit

Impor 10 golongan nonmigas utama pada Juli 2023 tercatat senilai US\$23,68 juta (naik 32,04 persen dibandingkan Juni 2023 yang sebesar US\$17,93 juta). Golongan barang nonmigas utama dengan nilai impor terbesar adalah golongan Barang dari besi dan baja (HS73) sebesar US\$9,54 juta, Mesin/peralatan listrik (HS85) senilai US\$3,73 juta, dan Mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (HS84) sebesar US\$3,65 juta.

Tabel 9. Ringkasan Perkembangan Impor Provinsi Papua Juli 2023*

Uraian	Nilai CIF (Juta US\$)			% Perubahan Juli 2023* thd Juni 2023	% Perubahan Jan-Jul 2023* thd Jan-Jul 2022	% Peran thd Total Impor Jan-Juli 2023*
	Juni 2023	Juli 2023*	Jan-Juli 2023*			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Impor	30,07	46,85	265,24	55,77	1,76	100,00
Migas	8,40	18,50	88,18	120,11	-35,41	33,24
Non Migas	21,67	28,35	177,06	30,82	42,64	66,76

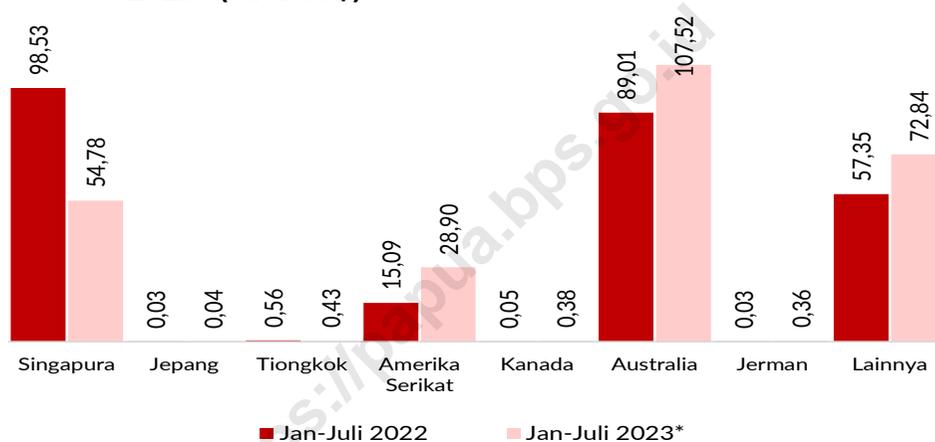
Ket:Tanda (*) menunjukkan Angka Sementara

C. Impor Menurut Negara Asal

Nilai impor dari tujuh negara utama pada Juli 2023 tercatat sebesar US\$37,81 juta atau naik sebesar 53,62 persen dibandingkan nilainya pada Juni 2023 sebesar US\$24,61 juta. Sementara Impor dari negara lainnya mengalami peningkatan dari US\$5,46 juta, menjadi US\$9,04 juta.

Jika dibandingkan dengan kondisi Januari-Juli 2022 maka total nilai impor kumulatif dari tujuh negara utama pada Januari-Juli 2023 lebih rendah 5,36 persen, sebaliknya total nilai impor kumulatif dari negara lainnya yang naik 27,02 persen dibandingkan Januari-Juli 2022.

Gambar 14. Nilai Impor Provinsi Papua Menurut Negara Asal Januari-Juli 2023* (Juta US\$)



Ket:Tanda (*) menunjukkan Angka Sementara

D. Neraca Perdagangan

Neraca perdagangan Papua pada Juli 2023 mengalami surplus US\$210,58 juta. Kondisi surplus menggambarkan nilai ekspor lebih besar dari nilai impor. Nilai ekspor Papua pada Juli 2023 sebesar US\$257,43 juta dan nilai importnya sebesar US\$46,85 juta.

Tabel 10. Neraca Perdagangan Provinsi Papua (Juta US\$)

Bulan	Ekspor (Juta US\$)	Impor (Juta US\$)	Neraca Perdagangan (Juta US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)
Juni 23	399,43	30,07	369,36
Juli 23	257,43	46,85	210,58

Ket:Tanda (*) menunjukkan Angka Sementara



PENJELASAN TEKNIS

- Total nilai impor adalah jumlah nilai dari Cost, Insurance, and Freight (CIF) seluruh barang impor yang masuk ke wilayah pabean Indonesia.
- $CIF = Fob + Insurance + Freight$
- Nilai impor menggunakan valuta asing Dollar AS dan berat bersih menggunakan kilogram.
- Impor berupa impor migas dan impor nonmigas.
- Enam negara impor utama di Papua adalah Singapura, Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Jerman.

<https://papua.bps.go.id>

15 Nilai Tukar Petani

"Juli 2023, NTP Papua sebesar 100,11"

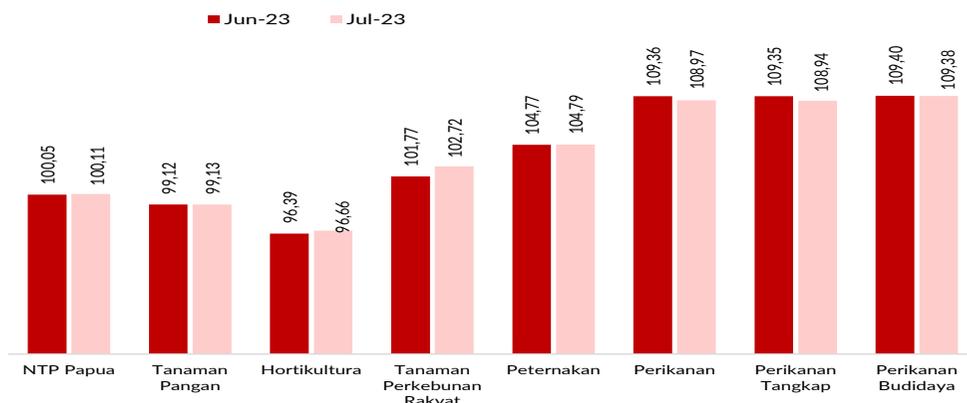
A. Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP Papua Juli 2023 tercatat naik 0,06 persen menjadi 100,11 dibandingkan NTP Juni 2023. Berdasarkan pemantauan harga perdesaan di beberapa daerah di Papua, perubahan indeks NTP disebabkan karena indeks harga yang diterima petani (It) naik sebesar 0,12 persen, dan indeks harga yang dibayar petani (Ib) naik sebesar 0,06 persen.

Dilihat menurut subsektornya, perubahan angka indeks yang terjadi yaitu subsektor Tanaman Pangan naik 0,01 persen, subsektor Hortikultura naik 0,28 persen, subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat naik 0,93 persen, subsektor Peternakan naik 0,02 persen, dan subsektor Perikanan turun -0,36 persen.

Perubahan harga komoditas yang dihasilkan petani ditunjukkan oleh indeks harga yang diterima petani (It). Pada Juli 2023, It Papua sebesar 111,08 atau naik 0,12 persen dibandingkan It Juni 2023. Peningkatan It disebabkan oleh peningkatan indeks di beberapa subsektor yaitu subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,08 persen, Hortikultura sebesar 0,29 persen, Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,91 persen dan Peternakan sebesar 0,02 persen.

Gambar 15. Perkembangan NTP Papua Menurut Subsektor Juni-Juli 2023 (2018=100)





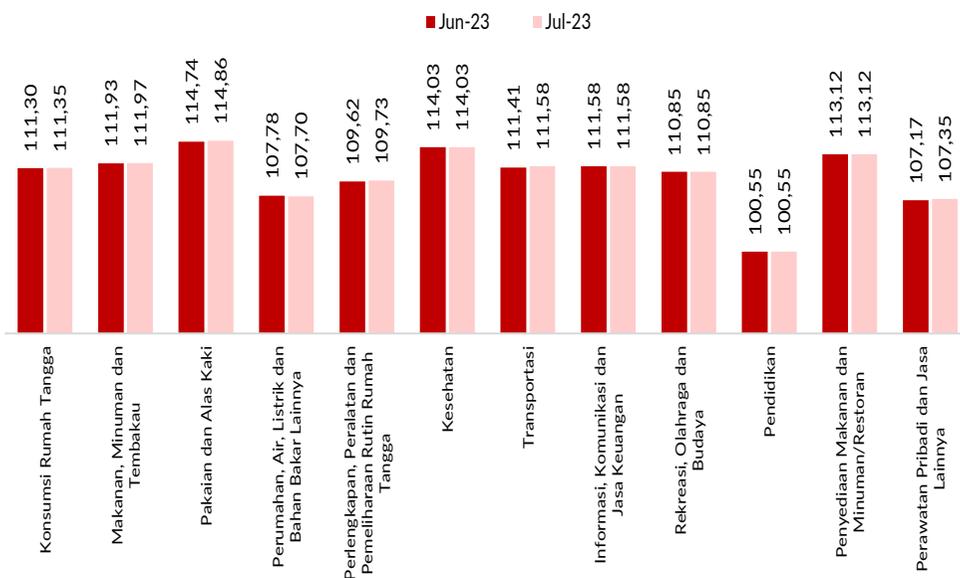
Fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat perdesaan, khususnya petani baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk keperluan produksi hasil pertanian dapat diketahui melalui indeks harga dibayar petani (Ib). Pada Juli 2023, Ib Papua sebesar 110,96 atau naik 0,06 persen dibandingkan Ib bulan sebelumnya. Peningkatan Ib gabungan tersebut didorong oleh peningkatan Ib pada tiga subsektor pertanian, yaitu subsektor Tanaman Pangan naik sebesar 0,08 persen, subsektor Hortikultura naik sebesar 0,01 persen, dan subsektor Perikanan naik sebesar 0,10 persen.

B. Perkembangan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT)

Konsumsi Rumah Tangga Petani merupakan salah satu komponen nilai yang dibayar oleh Petani. Pada Juli 2023, terlihat gambar 15, terjadi peningkatan IKRT sebesar 0,04 persen di wilayah perdesaan Papua yang dipicu oleh naiknya indeks harga pada kelompok pengeluaran rumah tangga.

IKRT nasional bulan Juli 2023 tercatat mengalami peningkatan sebesar 0,14 persen. Dari 34 provinsi yang dihitung IKRT-nya pada Juni 2023, diketahui sebanyak 25 provinsi yang mengalami kenaikan. Provinsi Sumatera Barat tercatat mengalami peningkatan IKRT tertinggi pada Juli 2023 yaitu sebesar 1,06 persen. Sementara itu, provinsi yang mengalami penurunan IKRT terdalam yaitu Provinsi Bangka Belitung dengan penurunan sebesar 0,32 persen.

Gambar 16. Perkembangan Indeks Konsumsi Rumah Tangga Menurut Subkelompok Pengeluaran Provinsi Papua, Juni-Juli 2023 (2018=100)



C. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Subsektor

NTUP Papua pada Juli 2023 adalah 101,58 atau turun sebesar 0,02 persen. Berdasarkan subsektor, tercatat NTUP subsektor Tanaman Pangan turun sebesar 0,09 persen, subsektor Hortikultura naik sebesar 0,21 persen, subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat naik sebesar 0,91 persen, subsektor Peternakan naik sebesar 0,02 persen dan subsektor Perikanan turun sebesar 0,38 persen.

Tabel 11. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian Menurut Subsektor Provinsi Papua dan Persentase Perubahannya, Juni-Juli 2023 (2018=100)

Subsektor (1)	Juni 2023 (2)	Juli 2023 (3)	Perubahan (%) (4)
1. Tanaman Pangan	99,97	99,88	-0,09
2. Hortikultura	101,32	101,53	0,21
3. Tanaman Perkebunan Rakyat	103,30	104,25	0,91
4. Peternakan	109,14	109,16	0,02
5. Perikanan	110,13	109,71	-0,38
5.1 Perikanan Tangkap	109,95	109,51	-0,40
5.2 Perikanan Budidaya	113,22	113,23	0,01
NTUP Gabungan	101,60	101,58	-0,02



PENJELASAN TEKNIS

- NTP yang diperoleh dari perbandingan indeks harga diterima petani (It) terhadap indeks harga dibayar petani (Ib) (dalam persentase) merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan. NTP menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif, semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.
- Mulai Januari 2020, penghitungan NTP menggunakan indeks harga dengan tahun dasar baru yakni 2018=100 baik untuk It maupun Ib. Ada beberapa perubahan mendasar dalam penghitungan indeks harga 2018=100 dibandingkan dengan indeks harga 2012=100, khususnya mengenai paket komoditas maupun diagram timbang pada masing-masing subsektor yakni Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan dan Perikanan. Pada Subsektor Perikanan, diagram timbang dibangun dari kegiatan Penangkapan Ikan maupun Kegiatan Budidaya Ikan.
- Perubahan paket komoditas dan diagram timbang dalam penghitungan NTP dengan indeks harga 2018=100 didasarkan pada hasil Survei Penyempurnaan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani 2017 (SPDT-NTP 2017) yang dilaksanakan oleh BPS. Hasil SPDT-NTP 2017 ini sekaligus mencerminkan adanya perubahan pola produksi, pola biaya produksi dan pola konsumsi rumah tangga petani dibandingkan dengan hasil SPDT-NTP periode sebelumnya yang dilaksanakan pada tahun 2012. Secara nasional, penghitungan NTP dengan tahun dasar baru mencakup 34 provinsi sedangkan pada tahun dasar sebelumnya mencakup 33 provinsi.
- Perubahan mendasar lainnya terjadi pada pengklasifikasian pengeluaran konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu komponen nilai yang dibayar oleh rumah tangga petani. Perkembangan harga konsumsi rumah tangga yang meliputi berbagai barang dan jasa dari waktu ke waktu tercermin melalui Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT). IKRT yang dihitung dengan tahun dasar baru 2018=100 menggunakan klasifikasi pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan modifikasi Classification of Individual Consumption According to Purpose 2018 (COICOP 2018. COICOP 2018 merupakan referensi internasional untuk klasifikasi pengeluaran rumah tangga. Pengklasifikasian pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan COICOP 2018 terdiri dari 11 (sebelas) Kelompok Pengeluaran. Sementara itu, pada tahun dasar sebelumnya yakni 2012=100, pengklasifikasian rumah tangga didasarkan pada 7 (tujuh) Kelompok Pengeluaran berdasarkan modifikasi COICOP 1999.

16 *Angkutan Laut*

"Juni 2023, penumpang berangkat (angkutan laut dalam negeri) sebanyak 16.907 orang"

A. Penumpang Berangkat dan Datang

Ketentuan bepergian bagi pelaku perjalanan mengalami penyesuaian yang dituangkan dalam Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 1 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan pada Masa Transisi Endemi Covid-19, dimana aturan sebelumnya sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Penerapan protokol kesehatan tetap dilakukan, seperti menggunakan masker disaat keadaan tidak sehat, membawa hand sanitizer dan menggunakan aplikasi SATUSEHAT untuk memantau kesehatan pribadi.

Perkembangan penumpang berangkat menggunakan angkutan laut selama Juni 2023 dirangkum dalam Tabel 12 di bawah ini. Jumlah penumpang yang berangkat menggunakan angkutan laut dalam negeri pada Juni 2023 tercatat sebanyak 16.907 orang atau naik 17,30 persen dibanding Mei 2023 yang sebanyak 14.414 orang. Sedangkan Jumlah penumpang yang datang menggunakan angkutan laut dalam negeri pada Juni 2023 sebanyak 17.595 orang atau naik sebesar 0,65 persen jika dibandingkan dengan bulan lalu sebanyak 17.481 orang.

Tabel 12. Perkembangan Penumpang Berangkat dan Datang Angkutan Laut Dalam Negeri Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke, Juni 2023

Pelabuhan	Jumlah Penumpang Berangkat			Jumlah Penumpang Datang		
	Mei'23 (orang)	Juni'23 (orang)	Perubahan Juni'23 thd Mei'23	Mei'23 (orang)	Juni'23 (orang)	Perubahan Juni'23 thd Mei'23
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jayapura	11.532	14.448	25,29	14.844	13.874	-6,53
Merauke	2.882	2.459	-14,68	2.637	3.721	41,11
Total	14.414	16.907	17,30	17.481	17.595	0,65

Secara kumulatif jumlah embarkasi penumpang angkutan laut selama Januari-Juni 2023 mencapai 80.950 orang atau naik 38,56 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebanyak 58.422 orang. Dibandingkan periode Januari-Juni 2022, arus debarkasi penumpang periode Januari-Juni 2023 naik 37,73 persen dari 62.992 orang menjadi 86.762 orang.

B. Bongkar dan Muat Barang

Volume barang yang dimuat pada Juni 2023 tercatat sebesar 12.745 ton atau turun sebesar 51,41 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 26.230 ton. Di Pelabuhan Jayapura, volume muat barang pada Juni 2023 tercatat sebesar 9.723 ton atau turun sebesar 56,52 persen dibandingkan Mei 2023 yang sebesar 22.360 ton, sedangkan volume muat barang pada Pelabuhan Merauke sebesar 3.022 ton atau turun sebesar 21,91 persen dibandingkan Mei 2023 yang sebesar 3.870 ton.

Secara kumulatif, volume barang yang dimuat dan dibongkar pada Januari-Juni 2023 masing-masing di kedua pelabuhan sebesar 121.319 ton naik 5,25 persen dan 107.473 ton (turun -18,28 persen) bila dibandingkan dengan Mei 2022.

Tabel 13. Perkembangan Bongkar dan Muat Barang Angkutan Laut Dalam Negeri Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke, Juni 2023

Pelabuhan	Volume Bongkar Barang			Volume Muat Barang		
	Mei'23 (Ton)	Juni'23 (Ton)	Perubahan Juni'23 thd Mei'23 (%)	Mei'23 (Ton)	Juni'23 (Ton)	Perubahan Juni'23 thd Mei'23 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jayapura	84.686	66.189	-21,84	22.360	9.723	-56,52
Merauke	46.827	41.284	-11,84	3.870	3.022	-21,91
Total	131.513	107.473	-18,28	26.230	12.745	-51,41

PENJELASAN TEKNIS

- Angkutan Laut terdiri atas data penumpang yang berangkat/datang dan barang yang dibongkar dan dimuat di pelabuhan pelabuhan Jayapura dan Merauke.
- Periode pengumpulan data dilakukan pada satu bulan sebelum bulan berjalan.
- Data berasal dari data SIMOPEL yang berasal dari pelabuhan.

17 Angkutan Udara

"Juni 2023, penumpang berangkat (angkutan udara dalam negeri) sebanyak 99.863 orang"

A. Penumpang Berangkat dan Datang

Jumlah penumpang yang berangkat menggunakan angkutan udara dalam negeri pada Juni 2023 tercatat sebanyak 99.863 orang atau naik 5,15 persen dibanding Mei 2023 yang sebanyak 94.972 orang. Dilihat menurut bandara, jumlah penumpang yang berangkat melalui Bandara Sentani di Jayapura tercatat sebanyak 60.710 orang, penumpang yang berangkat melalui Bandara Mopah di Merauke sejumlah 13.785 orang, dan jumlah penumpang yang berangkat melalui Bandara Mozes Kilangin di Mimika sebanyak 25.368 orang.

Jumlah penumpang yang datang dengan menggunakan angkutan udara dalam negeri pada Juni 2023 tercatat sebanyak 105.894 orang atau turun 7,23 persen bila dibandingkan Mei 2023 yang sebanyak 114.146 orang. Jumlah penumpang yang datang pada Juni 2023 tercatat sebanyak 73.391 orang di Bandara Sentani, 12.620 orang di Bandara Mopah, dan 19.883 orang di Bandara Mozes Kilangin.

Tabel 14. Perkembangan Penumpang Berangkat dan Datang Angkutan Udara Dalam Negeri Bandara Sentani, Mopah, dan Mozes Kilangin, Juni 2023

Bandara	Jumlah Penumpang Berangkat			Jumlah Penumpang Datang		
	Mei'23 (orang)	Juni'23 (orang)	% Perubahan Mei'23 thd Apr'23	Mei'23 (orang)	Juni'23 (orang)	% Perubahan Mei'23 thd Apr'23
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sentani	59.813	60.710	1,50	77.678	73.391	-5,52
Mopah	13.918	13.785	-0,96	14.540	13.620	-13,20
Mozes Kilangin	21.241	25.368	19,43	21.928	19.883	-9,33
Total	94.972	99.863	5,15	114.146	105.894	-7,23

Secara kumulatif, jumlah embarkasi penumpang angkutan udara selama Januari-Juni 2023 mencapai 537.543 orang atau turun sebesar 7,12 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 yang sebanyak 578.772 orang. Arus debarkasi penumpang angkutan udara selama Januari-Juni 2023 mengalami penurunan sebesar 13,73 persen menjadi 585.732 orang jika dibandingkan Januari-Juni 2022 yang sebanyak 678.964 orang.

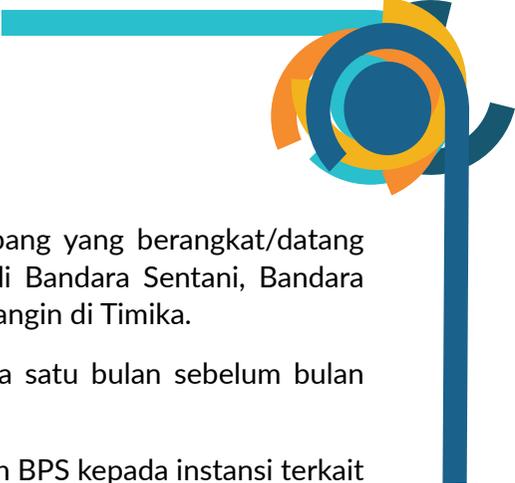
B. Bongkar dan Muat Barang

Volume barang yang dimuat pada Juni 2023 tercatat sebesar 9.405 ton atau turun sebesar 7,08 persen dibandingkan bulan Mei 2023 yang sebesar 10.121 ton. Di Bandara Sentani, volume muat barang pada Juni 2023 tercatat sebesar 8.374 ton atau turun sebesar 7,42 persen dibandingkan Mei 2023 yang sebesar 9.045 ton. Di Bandara Mopah, volume muat barang tercatat sebesar 161 ton atau turun sebesar 4,41 persen dibandingkan bulan Mei yang sebesar 168 ton. Di Bandara Mozes Kilangin, volume muat barang tercatat sebesar 870 ton atau turun sebesar 4,19 persen dibandingkan bulan Mei yang sebesar 908 ton. Secara kumulatif, volume muat barang sepanjang Januari-Juni 2023 sebesar 57.269 ton, turun sebesar 13,39 persen bila dibandingkan dengan Januari-Juni 2022 yang sebesar 66.122 ton.

Sementara itu, volume barang yang dibongkar pada Juni 2023 sebesar 986 ton atau turun 2,73 persen dibanding bulan Mei 2023 sebesar 1.014 ton, di Bandara Sentani turun sebesar 8,92 persen; Bandara Mopah turun sebesar 4,14 persen; sedangkan untuk Bandara Mozes Kilangin naik sebesar 13,31 persen.

Tabel 15. Perkembangan Bongkar dan Muat Barang Angkutan Udara Dalam Negeri Bandara Sentani, Mopah, dan Mozes Kilangin, Juni 2023

Bandara	Volume Bongkar Barang			Volume Muat Barang		
	Mei'23 (Ton)	Juni'23 (Ton)	% Perubahan Juni'23 thd Mei'23	Mei'23 (Ton)	Juni'23 (Ton)	% Perubahan Juni'23 thd Mei'23
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sentani	666	606	-8,92	9.045	8.374	-7,42
Mopah	84	81	-4,14	168	161	-4,41
Mozes Kilangin	264	299	13,31	908	870	-4,19
Total	1.014	986	-2,73	10.121	9.405	-7,08



PENJELASAN TEKNIS

- Angkutan Udara terdiri atas data penumpang yang berangkat/datang dan barang yang dibongkar dan dimuat di Bandara Sentani, Bandara Mopah di Merauke dan Bandara Mozez Kilangin di Timika.
- Periode pengumpulan data dilakukan pada satu bulan sebelum bulan berjalan.
- Data berasal dari survei yang dilakukan oleh BPS kepada instansi terkait terkait (Bandara).

<https://papua.bps.go.id>

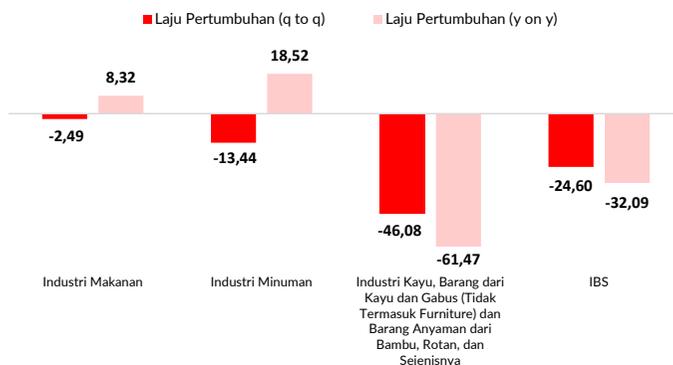
Industri Manufaktur 18

"Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang di triwulan IV-2019 tumbuh negatif 24,60 persen"

A. Industri Manufaktur Besar Dan Sedang Triwulan IV-Tahun 2019

Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang (q-to-q) pada Triwulan IV-2019 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 24,60 persen dari Triwulan III-2019. Angka pertumbuhan tersebut lebih rendah dari angka pertumbuhan secara nasional yang tumbuh positif sebesar 0,09 persen. Penurunan angka pertumbuhan ini disebabkan karena terjadi penurunan produksi pada Industri Kayu, Barang dari Kayu (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya (KBLI 16). Produksi kayu mengalami penurunan drastis karena vakumnya salah satu perusahaan kayu dengan skala besar di Papua sehingga mempengaruhi jumlah kayu yang dihasilkan. Selain itu, terkait pembatasan izin untuk memperluas lahan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) juga belum menemukan titik terang hingga saat ini. Kondisi yang sama terjadi pada produksi Industri Minuman (KBLI 11). Hal ini merupakan efek lanjutan dari kerusuhan yang terjadi di Papua pada triwulan lalu. Selain itu banyak acara-acara akhir tahun yang tidak dilaksanakan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, mengingat kondisi di beberapa tempat belum kondusif sepenuhnya, yang secara tidak langsung menyebabkan permintaan juga ikut menurun.

Gambar 17. Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Menurut KBLI Provinsi Papua Triwulan IV-2019 (persen)



Catatan:

Dari beberapa jenis IBS yang ada di Papua, hanya Industri Makanan (KBLI 10) dan Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya (KBLI 16) saja yang dapat dipublikasikan. Hal ini disebabkan karena tidak semua jenis industri manufaktur besar dan sedang memenuhi syarat penghitungan pertumbuhan produksi industri, karena jumlah perusahaannya yang sangat sedikit.



Jika dibandingkan dengan pertumbuhan produksi Triwulan IV-2018 pertumbuhan Produksi IBS (y-on-y) Provinsi Papua selama Triwulan IV-2019 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 32,09 persen. Hal itu dikarenakan Industri Kayu, Barang dari Kayu (tidak termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya (KBLI 16) mengalami penurunan secara (y-on-y) pada triwulan IV-2019.

B. Industri Manufaktur Mikro Dan Kecil (IMK) Triwulan IV-2019

Pertumbuhan produksi Industri Mikro dan Kecil di Papua pada Triwulan IV-2019 secara (q-to-q) tumbuh sebesar 1,36 persen dari Triwulan III-2019 dan berada di atas pertumbuhan nasional yang tumbuh negatif sebesar 0,24 persen.

Pertumbuhan positif tersebut dipengaruhi karena adanya perayaan Hari Raya Natal. Produksi barang galian bukan logam (KBLI 23), makanan (KBLI 10) dan minuman (KBLI 11) dengan share yang cukup besar mengalami pertumbuhan positif yaitu 3,68 persen, 0,94 persen dan 5,20 persen dari Triwulan III-2019. Secara y-o-y, produksi Industri Mikro dan Kecil di Papua pada Triwulan IV-2019 ini mengalami pertumbuhan positif 10,53 persen dibandingkan Triwulan IV-2018.

Tabel 16. Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Menurut KBLI Provinsi Papua Triwulan IV-2019 (persen)

Kode KBLI	Jenis Industri	Pertumbuhan (%)	
		q to q	y-on-y
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Industri Makanan	0,94	7,28
11	Industri Minuman	5,20	3,88
13	Industri Tekstil	2,06	-7,33
14	Industri Pakaian Jadi	14,42	1,47
15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	22,58	5,63
16	Industri Kayu, Barang dari Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	-6,04	-5,74
18	Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	13,25	-22,19
20	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	-17,13	35,09
21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	-19,26	-32,98
23	Industri Barang Galian Bukan Logam	3,68	5,82
25	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	1,50	4,94
30	Industri Alat Angkutan Lainnya	-55,40	25,98
31	Industri Furnitur	-1,37	-14,34
32	Industri Pengolahan Lainnya	61,21	33,34
33**	Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	-41,42	97,55
<small>Catatan</small>	n**) Angka hanya diwakili oleh satu sampel usaha/perusahaan dengan beberapa komoditi		
<small>catatan:</small>	**) Angka hanya diwakili oleh satu sampel usaha/perusahaan dengan beberapa komoditi		

Pola Distribusi Perdagangan **19**

"Margin Perdagangan dan Pengangkutan Total (MPPT) Provinsi Papua tahun 2022 terdiri atas komoditas Beras, Daging Ayam Ras, Bawang Merah dan Cabai Merah"

Margin Perdagangan dan Pengangkutan Total (MPPT) Provinsi Papua tahun 2021 untuk komoditas beras 21,52 persen; daging ayam ras 36,58 persen; bawang merah 67,18 persen; dan cabai merah 43,28 persen.

Margin Perdagangan dan Pengangkutan Total (MPPT) nasional pada tahun 2021 untuk komoditas beras 11,31 persen; daging ayam ras 25,49 persen; bawang merah 47,39 persen; dan cabai merah 40,41 persen.

Tabel 17. Pola Utama Distribusi Perdagangan di Papua Tahun 2022

Komoditas (1)	Pola Distribusi Perdagangan (2)
Beras	Produsen -> Distributor -> Pedagang Eceran -> Konsumen Akhir
Daging Ayam Ras	Luar Provinsi -> Pedagang Grosir -> Pedagang Eceran -> Konsumen Akhir
Bawang Merah	Luar Provinsi -> Pedagang Pengepul -> Pedagang Eceran -> Konsumen Akhir
Cabai Merah	Produsen -> Pedagang Grosir -> Pedagang Eceran -> Konsumen Akhir

PENJELASAN TEKNIS

- Survei pola distribusi perdagangan beberapa komoditas (Poldis) merupakan survei yang bertujuan untuk mendapatkan pola distribusi perdagangan dan MPPT dari produsen hingga konsumen akhir pada suatu wilayah.
- Data yang dikumpulkan merupakan data tahun 2020, dengan responden produsen dan pedagang yang tersebar di 354 kabupaten/kota potensi komoditas terpilih di 34 provinsi.
- Komoditas strategis dalam survei Poldis dipilih berdasarkan kriteria komoditas yang paling banyak dikonsumsi masyarakat, komoditas yang memiliki peran besar dalam pembentukan inflasi dan komoditas yang mempunyai kontribusi cukup besar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).
- Pada tahun 2021, komoditas yang terpilih adalah beras, daging ayam ras, bawang merah, dan cabai merah.

"Tingkat penghunian kamar (TPK) hotel bintang di Papua pada Juni 2023 mencapai 33,06 persen"

A. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang

Tingkat penghunian kamar hotel bintang di Papua selama Juni 2023 mencapai 33,06 persen (naik 1,71 poin) jika dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 31,35 persen. Kenaikan terjadi pada kelas bintang satu, bintang dua, dan bintang empat, yaitu masing-masing sebesar 4,17 poin, 2,57 poin dan 2,04 poin. Sementara untuk bintang kelas tigamengalami penurunan sebesar 1,89 poin.

B. Rata-rata Lama Menginap Tamu (RLMT) Hotel Bintang

Rata-rata Lama Menginap Tamu (RLMT) di hotel bintang selama Mei 2023 mencapai Juni 2023 sebesar 1,56 hari atau turun sebesar 0,17 poin dibandingkan dengan bulan Mei 2023.

C. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Non Bintang

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel klasifikasi Non Bintang di Papua selama Juni 2023 mencapai 21,59 persen atau naik sebesar 0,57 poin dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 21,02 persen. Kenaikan terjadi

Tabel 18. TPK dan RLMT Hotel Bintang di Papua, Mei 2023

Uraian	TPK			RLMT		
	Apr 2023	Mei 2023*	Perubahan Mei 2023 thd Apr 2023 (poin)	Apr 2023	Mei 2023*	Perubahan Mei 2023 thd Apr 2023 (poin)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bintang 1	30,64	18,99	-11,65	2,80	1,62	-0,46
Bintang 2	25,96	27,84	1,88	1,91	1,45	-0,46
Bintang 3	40,12	39,94	-0,18	1,48	1,88	0,40
Bintang 4	34,16	31,91	-2,25	1,90	1,67	-0,23
Total Bintang	34,83	31,35	-3,48	1,71	1,73	0,02

Ket:Tanda (*) menunjukkan Angka Sementara

pada kelas satu, kelas dua dan kelas empat masing-masing sebesar 4,03 poin, 3,25 poin dan 1,77 poin. Sementara pada kelas tiga mengalami penurunan sebesar 4,02 poin.

Jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, terjadi kenaikan TPK Hotel Non Bintang pada Juni 2023 sebesar 2,76 poin. Kenaikan TPK pada masing-masing kelas dapat dilihat pada tabel 19.

D. Rata-rata Lama Menginap Tamu (RLMT) Hotel Non Bintang

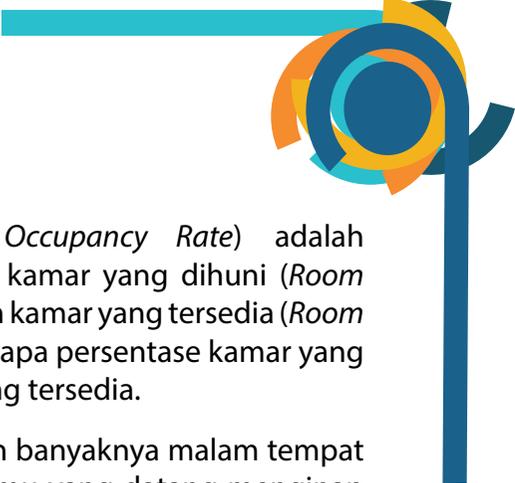
Rata-rata lama menginap tamu pada hotel klasifikasi Non Bintang di Papua pada bulan Juni 2023 mencapai 1,48 hari atau turun sebesar 0,05 poin dibanding Mei 2023 yang sebesar 1,53 hari. Penurunan RLMT terjadi pada kelas dua dan kelas empat yaitu masing-masing sebesar 0,08 poin, dan 0,20 poin. Sementara pada kelas satu dan kelas tiga mengalami peningkatan sebesar 0,39 poin dan 0,05 poin.

Sementara itu, rata-rata lama menginap tamu (RLMT) di Hotel Non Bintang dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya RLMT pada Hotel Non Bintang mengalami penurunan sebesar 0,06 poin. Peningkatan terjadi pada kelas satu dan kelas dua yaitu sebesar 0,38 poin, dan 0,06 poin. Sementara, kelas tiga dan kelas empat mengalami penurunan sebesar 0,18 poin dan 0,02 poin.

Tabel 19. TPK dan RLMT Hotel Non Bintang di Papua, April 2023

Uraian	TPK			RLMT		
	Mei 2023	Juni 2023*	Perubahan Juni 2023 thd Mei 2023 (poin)	Mei 2023	Juni 2023*	Perubahan Mei 2023 thd Juni 2023 (poin)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kelas 1	17,45	21,48	4,03	1,47	1,86	0,39
Kelas 2	19,59	22,84	3,25	1,72	1,64	-0,08
Kelas 3	26,37	22,35	-4,02	1,38	1,43	0,05
Kelas 4	17,60	19,37	1,77	1,53	1,33	-0,20
Total Bintang	21,02	21,59	0,57	1,53	1,48	-0,05

Ket: Tanda (*) menunjukkan Angka Sementara



PENJELASAN TEKNIS

- Tingkat Penghunian Kamar (*Room Occupancy Rate*) adalah perbandingan antara banyaknya malam kamar yang dihuni (*Room Night Occupied*) dengan banyaknya malam kamar yang tersedia (*Room Night Available*). TPK mengindikasikan berapa persentase kamar yang terpakai dibandingkan dengan kamar yang tersedia.
- Rata-rata lamanya tamu menginap adalah banyaknya malam tempat tidur yang dipakai dengan banyaknya tamu yang datang menginap ke akomodasi. Rata-rata lama menginap mengindikasikan berapa lama tamu yang datang dan menginap di suatu hotel/akomodasi, dalam satuan hari.
- Tingkat Penghunian Kamar (TPK) maupun Rata-Rata Lama Menginap Tamu (RLMT) dibedakan atas hotel bintang dan hotel non bintang. Dimana Hotel Bintang terbagi atas 4 kelas Bintang yaitu Bintang Satu, Bintang Dua, Bintang Tiga dan Bintang Empat. Sedangkan hotel non bintang dibedakan menjadi Kelas Satu, Kelas Dua, Kelas Tiga dan Kelas Empat.

Lampiran





LAMPIRAN 1

Indikator Makro Provinsi Papua Tahun 2018 - 2022

Jenis Indikator		2018	2019	2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indikator Sosial						
Kependudukan dan Kemiskinan	Jumlah penduduk (jiwa)	3.322.526 ¹	3.379.302 ¹	4.303.707 ²	4.355.707 ⁴	4.418.581 ⁴
	IPM	60,06	60,84	60,44	60,62	61,39
	1. AHH saat lahir (tahun)	65,36	65,65	65,79	65,93	66,23
	2. Harapan lama sekolah (tahun)	10,83	11,05	11,08	11,11	11,14
	3. Rata-rata lama sekolah (tahun)	6,52	6,65	6,69	6,76	7,02
	4. Pengeluaran perkapita disesuaikan (ribu Rp)	7.159	7.336	6.954	6.955	7.146
	Angkatan kerja (jiwa)					
	Februari	1.851.486	1.808.848	1.837.805	1.832.278	2.584.857
	Agustus	1.835.963	1.842.203	1.767.403	1.952.777	1.991.097
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)					
	Februari	79,38	76,04	75,01	73,47 ³	80,23 ³
	Agustus	79,11 ³	76,92 ³	72,16 ³	78,29 ³	77,75 ³
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			-		
	Februari	2,91	3,42	3,42	3,77 ³	3,60 ³
	Agustus	3,20 ³	3,65 ³	4,28 ³	3,33 ³	2,83 ³
	Persentase penduduk miskin (persen)					
	Maret	27,74	27,53	26,64	26,86	26,56
	September	27,43	26,55	26,80	27,38	26,80
	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)					
	Maret	499.463	540.099	562.992	591.959	629.175
	September	518.811	557.236	580.463	600.795	669.408
	Distribusi pendapatan (perse)					
	Maret					
	40 % berpendapatan rendah	15,55	15,35	15,62	15,74	15,46
	40 % berpendapatan sedang	41,03	40,10	39,73	38,43	37,86
	20 % berpendapatan tinggi	43,42	44,55	44,66	45,82	46,68
	September					
	40 % berpendapatan rendah	14,77	15,74	15,72	15,94	15,78
	40 % berpendapatan sedang	40,67	39,34	39,48	38,06	39,14
	20 % berpendapatan tinggi	44,57	44,92	44,80	45,99	45,09
Gini Ratio						
Maret	0,384	0,394	0,392	0,397	0,406	
September	0,398	0,391	0,395	0,396	0,393	

Keterangan:

¹Angka Hasil Proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2010

²Angka Hasil Sensus Penduduk (SP) September 2020

³Perhitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015

⁴Angka Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni)



Indikator Makro Provinsi Papua Tahun 2018 – 2022 (lanjutan)

Jenis Indikator		2018	2019	2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indikator Ekonomi						
Perkembangan Ekonomi	Ekspor-Impor					
	Ekspor (Juta US\$)	3.856,46	1.209,75	1.917,37	4.439,75	6.273,43
	<i>Januari-Desember</i>					
	Impor (Juta US\$)	522,17	355,35	199,46	383,59	479,01
	<i>Januari-Desember</i>					
	Neraca Perdagangan(Juta US\$)	3.334,29	854,40	1.717,91	4.056,09	5.794,42
	<i>Januari-Desember</i>					
	Inflasi					
	Inflasi Kota Jayapura	6,70	0,66	1,77	1,38	4,28
	Inflasi Kabupaten Merauke	5,42	0,86	3,36	0,36	7,32
	Inflasi Kabupaten Timika	-	-	1,13	1,65	4,63
	Pertumbuhan Ekonomi (persen)					
	Dengan Tambang (Persen)	7,32	-15,75	2,32	15,11	2,70
	Tanpa Tambang (Persen)	5,14	4,98	-3,51	2,49	1,37
	PDRB Berlaku					
	Dengan Tambang (miliar Rp)	210.600,57	189.510,69	199.186,57	235.486,12	262.515,82
	Tanpa Tambang (miliar Rp)	133.440,14	144.868,49	142.986,74	148.790,06	161.178,03
	PDRB Harga Konstan					
Dengan Tambang (miliar Rp)	159.711,85	134.565,89	137.787,29	158.674,30	172.904,85	
Tanpa Tambang (miliar Rp)	91.100,68	95.640,84	92.392,10	94.758,85	98.679,75	

LAMPIRAN 2

Indikator Strategis Provinsi Papua Tahun 2023

Jenis Indikator	Satuan	2023												
		Jan'	Feb'	Mar'	Apr'	Mei	Jun'	Jul'	Agu'	Sep'	Okt'	Nov'	Des'	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Perkembangan Ekonomi	Ekonomi													
	Ekspor	Juta US\$	297,31	195,81	443,08	773,78	620,42	399,43	257,43	-	-	-	-	
	Impor	Juta US\$	35,83	42,46	58,16	22,22	29,65	30,07	46,85	-	-	-	-	
	Neraca Perdagangan	Juta US\$	261,48	153,35	384,92	751,56	590,76	369,36	210,58	-	-	-	-	
	Inflasi													
	Inflasi Gabungan	Persen	-0,40	-0,61	0,39	4,05	3,69	4,13	0,10	-	-	-	-	
	Inflasi Kota Jayapura	Persen	-0,55	-0,84	0,12	1,44	-0,05	1,36	-0,16	-	-	-	-	
	Inflasi Kabupaten Merauke	Persen	0,41	0,10	0,90	1,05	1,03	1,09	-0,08	-	-	-	-	
	Inflasi Kabupaten Timika	Persen	-0,60	-0,59	0,64	1,40	0,75	0,76	0,83	-	-	-	-	
	Pertumbuhan Ekonomi (y-o-y)			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV	
	Dengan Tambang	Persen		-2,39			3,81			-			-	
	Tanpa Tambang	Persen		4,21			4,44			-			-	
	PDRB ADHB			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV	
	Dengan Tambang	Miliar Rp		65.294,28			71.079,91			-			-	
	Tanpa Tambang	Miliar Rp		41.628,92			42.949,96			-			-	
	Industri Manufaktur Besar dan Sedang	Persen	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	Industri Manufaktur Mikro dan Kecil	Persen	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	

LAMPIRAN 3

Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota se-Papua Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 1990, 2000, 2010 dan 2020

No.	Kabupaten/Kota	1990	2000	2010	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Merauke	243.722	318.350	195.716	230.932
2	Jayawijaya	355.562	417.326	196.085	269.553
3	Jayapura	246.467	167.227	111.943	166.171
4	Nabire	223.337	125.754	129.893	169.136
5	Kepulauan Yapen	70.333	81.593	82.951	112.676
6	Biak Numfor	90.843	111.092	126.798	134.650
7	Paniai	-	97.726	153.432	220.410
8	Puncak Jaya	-	79.356	101.148	224.527
9	Mimika	-	89.861	182.001	311.969
10	Boven Digoel	-	-	55.784	64.285
11	Mappi	-	-	81.658	108.295
12	Asmat	-	-	76.577	110.105
13	Yahukimo	-	-	164.512	350.880
14	Pegunungan Bintang	-	-	65.434	77.872
15	Tolikara	-	-	114.427	236.986
16	Sarmi	-	-	32.971	41.515
17	Keerom	-	-	48.536	61.623
18	Waropen	-	-	24.639	33.943
19	Supiori	-	-	15.874	22.547
20	Memberamo Raya	-	-	18.365	36.483
21	Nduga	-	-	79.053	106.533
22	Lanny Jaya	-	-	148.522	196.399
23	Mamberamo Tengah	-	-	39.537	50.685
24	Yalimo	-	-	50.763	101.973
25	Puncak	-	-	93.218	114.741
26	Dogiyai	-	-	84.230	116.206
27	Intan Jaya	-	-	40.490	135.043
28	Deiyai	-	-	62.119	99.091
29	Kota Jayapura	-	174.138	256.705	398.478
	Provinsi Papua	1.230.264	1.684.144	2.833.381	4.303.707



LAMPIRAN 4

Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota se-Papua Tahun 2018-2022

No.	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Merauke	156,56	153,05	150,93	148,88	143,10
2	Jayawijaya	311,96	304,65	295,03	288,05	252,52
3	Jayapura	125,98	123,98	120,87	121,79	118,75
4	Nabire	150,45	148,12	138,70	131,74	130,61
5	Kepulauan Yapen	142,25	149,24	142,53	136,06	128,94
6	Biak Numfor	134,88	132,35	129,53	125,74	130,13
7	Paniai	250,29	241,21	229,51	235,44	208,96
8	Puncak Jaya	464,12	459,89	449,51	446,40	373,95
9	Mimika	150,54	133,19	125,93	131,79	120,51
10	Boven Digoel	161,96	162,63	159,84	157,75	140,02
11	Mappi	167,70	152,24	152,02	155,91	150,06
12	Asmat	213,94	202,28	179,68	169,93	149,32
13	Yahukimo	220,02	205,60	192,81	181,94	163,30
14	Pegunungan Bintang	368,02	364,25	356,01	360,05	335,81
15	Tolikara	377,27	360,48	336,37	340,56	287,34
16	Sarmi	163,77	145,09	138,83	139,46	142,74
17	Keerom	147,62	141,98	134,14	127,56	138,87
18	Waropen	186,5	171,32	143,14	148,22	137,68
19	Supiori	149,02	138,44	130,43	139,26	140,95
20	Memberamo Raya	208,29	193,19	184,27	171,96	179,63
21	Nduga	325,36	307,41	297,45	294,92	258,56
22	Lanny Jaya	337,65	333,55	317,27	320,10	285,18
23	Mamberamo Tengah	429,33	422,66	391,82	373,08	323,69
24	Yalimo	370,50	362,18	349,27	333,99	278,42
25	Puncak	498,98	493,31	492,62	478,12	418,96
26	Dogiyai	236,53	224,53	213,51	212,94	192,14
27	Intan Jaya	441,38	439,11	438,39	447,97	405,90
28	Deiyai	253,83	238,89	229,01	238,23	211,21
29	Kota Jayapura	132,86	121,49	120,20	120,57	129,17
	Provinsi Papua	227,90	218,59	208,90	207,11	192,57

LAMPIRAN 5

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota se-Papua Tahun 2017-2022

No.	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Merauke	68,64	69,38	69,98	70,09	70,49	71,24
2	Jayawijaya	55,99	56,82	57,79	58,03	58,67	59,60
3	Jayapura	70,97	71,25	71,84	71,69	72,03	72,67
4	Nabire	67,11	67,70	68,53	68,83	69,15	69,91
5	Kepulauan Yapen	66,07	67,00	67,76	67,66	67,72	68,41
6	Biak Numfor	71,56	71,96	72,57	72,19	72,33	72,85
7	Paniai	54,91	55,83	56,58	56,31	56,70	57,14
8	Puncak Jaya	46,57	47,39	48,33	48,37	48,99	49,84
9	Mimika	72,42	73,15	74,13	74,19	74,48	75,08
10	Boven Digoel	60,14	60,83	61,51	61,53	61,62	62,52
11	Mappi	57,10	57,72	58,30	68,15	58,70	59,61
12	Asmat	48,49	49,37	50,37	50,55	51,29	52,22
13	Yahukimo	47,95	48,51	49,25	49,37	49,48	50,25
14	Pegunungan Bintang	43,24	44,22	45,21	45,44	46,28	47,21
15	Tolikara	47,89	48,85	49,68	49,50	49,60	50,51
16	Sarmi	62,31	63,00	63,45	63,63	63,94	64,86
17	Keerom	64,99	65,75	66,59	66,40	66,49	67,24
18	Waropen	64,08	64,80	65,34	64,94	65,10	65,67
19	Supiori	61,23	61,84	62,30	62,30	62,72	63,65
20	Memberamo Raya	50,25	51,24	52,20	51,78	52,18	53,10
21	Nduga	27,87	29,42	30,75	31,55	32,84	34,10
22	Lanny Jaya	46,49	47,34	48,00	47,86	48,68	49,62
23	Mamberamo Tengah	45,50	46,41	47,23	47,57	48,32	49,25
24	Yalimo	46,19	47,13	48,08	48,34	49,01	49,90
25	Puncak	41,06	41,81	42,70	43,04	43,17	43,87
26	Dogiyai	54,04	54,44	55,41	54,84	55,00	55,72
27	Intan Jaya	45,68	46,55	47,51	47,79	48,34	49,25
28	Deiyai	49,07	49,55	50,11	49,46	49,96	50,42
29	Kota Jayapura	79,23	79,58	80,16	79,94	80,11	80,61
	Provinsi Papua	59,09	60,06	60,84	60,44	60,62	61,39



LAMPIRAN 6

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Dengan Pertambahan dan Penggalian) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022 (Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Merauke	64.403.705,24	69.837.667,20	69.389.107,11	70.560.052,00	74.566.865,61
2	Jayawijaya	35.415.271,07	39.700.463,44	30.734.383,54	30.878.150,56	32.981.712,05
3	Jayapura	113.007.934,27	129.642.018,09	96.474.479,70	101.050.658,79	106.313.271,04
4	Nabire	69.908.072,16	76.260.397,88	66.246.968,06	70.299.467,72	73.350.909,83
5	Kepulauan Yapen	40.114.737,62	44.082.023,31	36.960.294,10	39.162.856,92	40.116.433,93
6	Biak Numfor	34.930.879,39	37.553.701,11	38.802.783,39	40.671.417,61	43.342.696,78
7	Paniai	22.462.852,42	24.702.408,02	19.502.416,66	19.897.948,14	20.704.712,36
8	Puncak Jaya	10.316.102,78	11.249.978,21	6.200.316,99	6.181.100,82	6.264.428,00
9	Mimika	395.993.721,40	256.580.274,85	204.960.691,37	301.036.539,30	343.247.031,56
10	Boven Digoel	67.435.795,70	71.091.624,73	75.065.315,00	76.520.614,71	77.820.198,80
11	Mappi	26.852.997,93	30.027.848,06	27.703.809,28	28.536.369,39	30.147.611,71
12	Asmat	23.626.517,20	25.428.215,11	23.414.875,20	24.139.980,57	25.420.847,68
13	Yahukimo	11.803.069,86	12.642.053,26	7.162.301,03	7.381.777,81	7.475.803,90
14	Pegunungan Bintang	23.700.771,49	25.392.900,76	25.284.199,00	26.600.407,13	28.074.353,10
15	Tolikara	10.627.506,78	11.155.789,30	7.081.554,59	7.139.924,12	7.506.789,03
16	Sarmi	64.315.850,93	71.940.091,41	70.862.080,01	74.486.213,89	78.241.330,17
17	Keerom	48.422.111,60	50.228.997,38	47.547.769,86	49.237.050,54	51.072.907,23
18	Waropen	62.601.875,94	65.619.884,44	60.452.726,53	61.436.297,86	66.108.619,73
19	Supiori	47.294.857,83	50.590.648,15	46.379.140,67	47.565.472,69	49.004.238,36
20	Memberamo Raya	63.708.877,65	70.012.180,75	47.377.017,46	49.624.541,45	52.541.672,67
21	Nduga	11.469.337,55	11.514.547,95	11.959.263,84	12.469.533,00	12.893.954,96
22	Lanny Jaya	9.435.175,66	9.597.930,98	9.854.242,86	10.167.057,24	10.652.106,52
23	Mamberamo Tengah	22.468.981,84	22.674.400,92	23.989.826,36	24.662.389,60	24.886.268,99
24	Yalimo	18.254.273,14	18.893.314,53	12.632.867,57	13.100.379,38	13.698.878,93
25	Puncak	11.569.147,43	12.743.460,64	12.544.717,96	13.104.809,85	13.870.173,64
26	Dogiyai	12.503.498,16	13.572.193,50	11.706.990,65	11.982.543,33	12.063.093,84
27	Intan Jaya	24.251.939,80	25.162.395,87	9.460.171,19	9.520.169,11	9.782.439,35
28	Deiyai	17.484.748,86	18.752.354,62	14.539.553,12	14.838.862,79	15.408.382,61
29	Kota Jayapura	102.166.321,11	108.043.849,90	80.637.679,49	82.026.393,17	86.232.327,04

* angka sementara

** angka sangat sementara



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://papua.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA**

Jl. Dr. Sam Ratulangi, Dok II, Jayapura 99112

Telp. (0967) 5165 999, 5165 107

Email: bps9400@bps.go.id